

MENATA PRAKONDISI NORMAL BARU / BENTUK KONSORSIUM HADAPI PANDEMI

MEDIA BPP

J E N D E L A I N F O R M A S I K E L I T B A N G A N

IKHTIAR KEMENDAGRI ATASI PANDEMI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI MENERBITKAN SEJUMLAH KEBIJAKAN
UNTUK MEMANDU PEMERINTAH DAERAH MENANGANI COVID-19.
MENDAGRI MENGIMBAU AGAR UPAYA PEMERINTAH DAERAH SELARAS
DENGAN LANGKAH PEMERINTAH PUSAT DAN BERINOVASI DALAM
TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19



9 772528 418001



VOL 5 NO 3 MEI-JUNI 2020

LITBANG.KEMENDAGRI.GO.ID

MAJALAH DWI BULANAN

P-ISSN 2503 3352

E-ISSN 2528 4181

Call for Papers

MATRA PEMBARUAN

(Nomor Akreditasi:14/E/KPT/2019 (SINTA 3))



Mengundang para peneliti, dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk mempublikasikan hasil-hasil riset mutakhir di Jurnal Matra Pembaruan Volume 2020, yang akan diterbitkan pada dua edisi yaitu **Mei dan November**.

Naskah merupakan karya ilmiah orisinal yang belum pernah dipublikasikan dan tidak memuat unsur plagiat



Naskah yang dikirimkan berupa resume hasil penelitian, bagian dari skripsi, tesis, atau disertasi yang telah mengalami penyesuaian untuk standar jurnal ilmiah. Artikel mengandung unsur temuan baru, yang merespons isu-isu dan wacana kontemporer terkait inovasi kebijakan

Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sebanyak 38.000 s.d 40.000 karakter (tanpa spasi) sudah termasuk referensi, daftar pustaka, dan tabel (jika ada). Naskah dalam Bahasa Indonesia disertai abstrak Bahasa Inggris, dan sebaliknya.



Sumber referensi minimal 10 sumber yang berasal dari jurnal ilmiah yang bisa diakses melalui daring (*online*).

Karena berbasis OJS, maka naskah akan dipublikasikan setiap awal bulan terbit setelah melalui review dan editing.



Sistematika penulisan terdiri dari empat pembabakan: Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan. Sedangkan gaya gaya APA (*American Psychological Association*) Lampirkan alamat korespondensi dan penulisan referensi dan kutipan MP menggunakan nomor telepon penulis.

Google Scholar

MORAREF

neliti

GARUDA
GARUDA RUJUKAN DIGITAL

Crossref

Registrasi dan submit artikel anda di
<http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp>

Jl. Kramat Raya, No 132, Senen, Jakarta Pusat
0858 1325 8250/Rifky (Whatsapp Only)
matrapembaruan@gmail.com

Sebagai pembina sekaligus pengawas jalannya pemerintahan daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya memandu pemerintah daerah (pemda) melakukan percepatan penanganan Covid-19. Salah satu langkahnya, yaitu mengarahkan pemda agar merealokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk difokuskan menangani Covid-19. Kemendagri juga mendorong daerah agar mampu berinovasi dalam menghadapi pandemi. Upaya yang belum lama ini dilakukan, misalnya, Kemendagri menggelar lomba inovasi daerah bertajuk “Penyiapan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19”. Lomba tersebut sejalan dengan upaya pemerintah yang tengah mengkaji penerapan tatanan normal baru.

Terkait itu, pada edisi Juni 2020, *Media BPP* berupaya menghadirkan informasi terkait upaya Kemendagri dalam menghadapi pandemi Covid-19, termasuk dalam mendukung prakondisi penerapan tatanan normal baru di seluruh pemda. Selain itu, ada pula informasi yang mengulas langkah Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) yang membentuk Konsorsium Riset

dan Inovasi Covid-19. Melalui wadah tersebut, Indonesia berupaya menghasilkan beragam inovasi dari tangan anak negeri untuk menghadapi pandemi.

Informasi menarik lainnya juga telah disiapkan yang tersaji dalam aneka rubrik. Seperti aktivitas BPP Kemendagri, yang terangkum dalam rubrik Jendela BPP. Ada pula informasi terkait BPP daerah yang menarik untuk dikunjungi. Selain itu, dalam rubrik Lebih Dekat, *Media BPP* mengulas sosok Prof. dr. Sofia Mubarika Haryana, M.Med.Sc yang memimpin tim riset untuk menghasilkan *rapid diagnostic test* Covid-19 dalam negeri.

Berbagai informasi yang disuguhkan, merupakan komitmen *Media BPP* untuk menghadirkan wacana konstruktif sebagai bahan diskursus bagi publik. Melalui upaya ini, diharapkan berbagai strategi kebijakan dapat semakin andal, terutama dalam menghadapi pandemi agar lekas berlalu dan tak banyak korban berjatuhan. Dengan tekad yang kuat dan semangat persatuan, *Media BPP* percaya Indonesia mampu melewati wabah ini. Selamat membaca.

Tabik...

Redaksi...

MEDIA BPP

PELINDUNG MENTERI DALAM NEGERI, TITO KARNAVIAN
PENANGGUNG JAWAB AGUS FATONI

PEMIMPIN REDAKSI	HORAS MAURITS PANJAITAN
REDAKTUR PELAKSANA	AJI NUR CAHYO
REDAKTUR	KURNIASIH ACHMAD JANI RIVAI YUSUF HORAS MAURITS PANJAITAN MATHEOS TAN
PENYUNTING	FRISCA NATALIA
PELIPUTAN	MUJAENI SAIDI RIFKY
PENATA LETAK	SAIDI RIFKY
ILUSTRASI COVER	TRES AUGUST
INFOGRAFIK	FAJAR HARAMUKTI

bina praja
press

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ALAMAT REDAKSI
JALAN KRAMAT RAYA NO. 132, JAKARTA PUSAT
PID@LITBANGKEMENDAGRI.COM

Penyiapan Tatanan Normal Baru

Belum lama ini pemerintah menggulirkan wacana penerapan tatanan normal baru produktif dan aman dari Covid-19. Seperti diketahui penerapan itu membutuhkan sejumlah strategi khusus agar masyarakat benar-benar siap dengan tatanan normal baru. Lantas bagaimana peran Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina sekaligus pengawas jalannya pemerintah dalam mendukung upaya penerapan itu.

-Pembaca Media BPP-

Banyak ilmuwan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang memprediksi pandemi ini akan berlangsung lama. Sampai dengan saat ini vaksin untuk menangani Covid-19 belum ditemukan. Dunia sedang bersiap untuk menghadapi tatanan normal baru. Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang terus mengkaji secara serius tatanan yang dimaksud dengan produktif dan aman Covid-19. Tatanan ini tidak lantas membuat pemerintah kendur dalam melawan pandemi. Justru pemerintah terus melakukan langkah strategis untuk menghadapi virus, sekaligus pencegahan dan penanganan, juga berupaya menemukan vaksinnya. Sebagai sesuatu yang baru, masyarakat perlu dikenalkan dengan tatanan ini. Karenanya, Kemendagri telah menggelar lomba inovasi daerah bertajuk "Penyiapan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19". Dengan lomba ini diharapkan pemerintah daerah termasuk masyarakatnya semakin mempersiapkan diri jika tatanan ini diterapkan.

Redaksi

Penerapan Protokol Kesehatan pada Tahapan Pilkada 2020

Penyelenggara pemilu sepakat pemilihan kepala daerah 2020 berlangsung pada 9 Desember 2020. Artinya, tahapan yang sempat tertunda telah kembali dilanjutkan. Pelaksanaan ini tentu membutuhkan banyak persiapan karena berlangsung di tengah pandemi. Lantas, bagaimana peran Kementerian Dalam Negeri agar pelaksanaan Pilkada 2020 ini tetap dalam kondisi yang aman dari Covid-19.

-Pembaca Media BPP-

Di depan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, secara tegas mengingatkan agar di setiap tahapan pemilihan kepala

daerah (Pilkada) serentak 2020, menerapkan secara ketat protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Salah satu tahapan yang perlu mendapat perhatian adalah tahapan pemutakhiran data pemilih yang akan dilakukan secara door to door. Seperti diketahui, tahapan Pilkada serentak 2020 yang sempat terhenti, telah kembali dilanjutkan pada 15 Juni 2020 kemarin. Pilkada di tengah pandemi memang memiliki kerawanan kesehatan, di samping kerawanan sengketa, konflik, dan lain-lainnya. Namun beberapa negara tetap melaksanakannya (tahapan pemilihan) dan sebagian besar pelaksanaannya sesuai jadwal yakni pada 2020 dengan catatan memerhatikan protokol kesehatan. Kemendagri juga terus mendorong kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Bawaslu juga menegaskan, protokol kesehatan akan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan dan pengawasan Pilkada serentak 2020.

Redaksi

Kualitas Pelayanan Publik Di Tengah Pandemi Jangan Sampai Menurun

Pandemi Covid-19 sedikit banyak telah membatasi pergerakan masyarakat. Bahkan, sejumlah instansi di lingkungan pemerintah daerah menerapkan kebijakan tertentu dalam memberikan pelayanan. Apakah ada strategi khusus agar kualitas pelayanan tetap stabil?

-Pembaca Media BPP-

Kemendagri menegaskan jangan sampai pandemi membuat pelayanan kepada publik menjadi menurun. Pemerintah daerah perlu berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik. Baik kualitas, proses pelayanan, maupun kualitas output pelayanan publik diharapkan tidak berkurang, kalau bisa meningkat walaupun di tengah wabah.

Redaksi

Opini dan Cerpen dapat dikirim melalui email pid@litbangkemendagri.com atau melalui whatsapp di 085813258250

MEDIA BPP

VOLUME 5 NO 3 | MEI-JUNI 2020

DAERAH **36**

BIDANG LITBANG DAN STATISTIK
KABUPATEN PANDEGLANG

MASUKAN BERHARGA SEKTOR WISATA

Untuk meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata, pada 2018, Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Bappeda Kabupaten Pandeglang melakukan penelitian terkait pengembangan sektor wisata di Pandeglang.



LEBIH DEKAT **40**

TEMUKAN INOVASI RDT COVID-19

Berawal dari forum daring yang dibuat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). BPPT mengundang dan mengajak beberapa peneliti Indonesia untuk bergabung melakukan riset dalam usaha penanganan Covid-19. Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. dr. Sofia Mubarika Haryana (71), menjadi satu dari sekian peneliti yang diajak bergabung. Dirinya tergerak untuk menciptakan alat diagnosis cepat (RDT)

JENDELA BPP **6**

AKTIVITAS **10**

INFOGRAFIS **31-32**

KILAS BERITA **43**

SAINS DAN
TEKNOLOGI **44**

GAYA HIDUP **45**

RESENSI BUKU **46**

RESENSI FILM **48**

SASTRA **50**

KOMIK **53**

OPINI
MENIMBANG MANFAAT
PENGUNAAN E-VOTING
DALAM PILKADA **54**

AGILITAS ASN
DI KENORMALAN BARU **56**

CATATAN **58**

LAPORAN UTAMA 16-30

IKHTIAR KEMENDAGRI ATASI PANDEMI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI MENERBITKAN SEJUMLAH KEBIJAKAN UNTUK MEMANDU PEMERINTAH DAERAH MENANGANI COVID-19. MENDAGRI MENGIKHTIAR AGAR UPAYA PEMERINTAH DAERAH SELARAS DENGAN LANGKAH PEMERINTAH PUSAT.



Perkuat IPKD dengan Permendagri

PERATURAN Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) telah terbit. Dengan Permendagri No 19 Tahun 2020 ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), melalui Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah berikhtiar membina pemerintah daerah khususnya dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Selama ini, regulasi yang mengatur secara jelas indikator di bidang pengelolaan keuangan tersebut masih belum tersedia.

Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah, Horas Maurits Panjaitan, menjelaskan dengan terbitnya Permendagri tersebut BPP Kemendagri akan segera melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah. Sosialisasi itu akan dilakukan secara virtual, karena masih dalam suasana pandemi. Sosialisasi dimaksudkan agar pemerintah daerah paham dan mendukung pengukuran IPKD. Dengan begitu, ekosistem pengelolaan keuangan daerah yang objektif dan andal dapat terbangun. "Di samping membangun ekosistem, hal ini agar daerah secara kompetitif meningkatkan kinerja tata kelola keuangannya, sosialisasi itu agar provinsi bisa menilai kabupaten atau kotanya dalam konteks pembinaan," ujar Maurits saat ditemui belum lama ini.

Pengukuran IPKD dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten dan kota maupun provinsi. Di tingkat provinsi, pengukuran ini dilakukan

oleh BPP Kemendagri. Sementara di tingkat kabupaten/kota akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi melalui badan litbang daerah atau perangkat daerah yang membidangi kelitbang.

Pengukuran ini akan dimulai pada 2020 yang didasarkan pada dokumen 2019. Sebelumnya, BPP Kemendagri telah melakukan simulasi pengukuran pada 2018 yang mengacu pada dokumen 2016 dan 2017. Hasil penghitungan simulasi itu sudah disampaikan kepada daerah dalam bentuk publikasi IPKD.

Menurut Permendagri No 19 Tahun 2020, pengukuran IPKD didasarkan pada enam dimensi, yaitu (1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) Kualitas anggaran belanja dalam APBD, (3) Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, (4) Penyerapan anggaran, (5) Kondisi keuangan daerah, (6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Setiap dimensi dilengkapi sejumlah indikator turunan. Misalnya, dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran yang mencakup beberapa hal di antaranya, kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD; kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS; kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD; kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS; dan kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD.

Banyaknya data yang dibutuhkan dalam pengukuran IPKD menjadi tantangan tersendiri. Berbagai kendala yang ada dalam simulasi sebelumnya, menjadi bekal pembenahan



■ Kapuslitbang Pembangunan dan Keuda BPP Kemendagri yang Juga Plt. Sekretaris BPP Kemendagri Horas Maurits Panjaitan memberikan arahan di Aula BPP Kemendagri kepada para Staf dan Pegawai

strategi untuk mendapatkan data. Meski begitu, Maurits tidak memungkiri masih adanya tantangan lain, misalnya mendapatkan dokumen perencanaan, seperti rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Di samping itu, mengetahui kebenaran data apakah tidak berubah atau semacamnya. Hal itu, menurutnya, membutuhkan kesiapan tim pengukuran. Di sisi lain, selain mengandalkan data dari pemerintah daerah, BPP Kemendagri juga berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti komponen Kemendagri terkait, Kementerian Keuangan, termasuk BPK. "Secara prinsip

kita akan tetap kejar data itu, jangan sampai ada yang tidak terisi," ujar Maurits.

Kembangkan aplikasi

BPP Kemendagri berencana mengembangkan aplikasi untuk mempercepat dan menjaga keakuratan pengukuran. Pengembangan ini berkolaborasi dengan Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri. Saat ini aplikasi yang dimiliki BPP Kemendagri masih terbilang seder-

hana. Meski kualitas hasil penilaian bergantung pada integritas tim, dan keakuratan data. "Kalau itu sudah diperoleh apakah dengan metode konvensional yang selama ini ada, sebenarnya sudah mumpuni," ujarnya. Namun, dengan adanya aplikasi ini dapat mendukung independensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Selain itu, Maurits berharap, BPP Kemendagri maupun pemerintah provinsi dapat membangun sistem yang menghimpun data sekaligus hasil pengukuran IPKD. Data tersebut kemudian dapat terintegrasi dalam sistem yang dimiliki BPP Kemendagri. Dengan begitu, dapat terlihat peta kondisi pengelolaan

keuangan di seluruh daerah, sehingga dapat memudahkan pembinaan. "Kita bangun pusat data khusus untuk pengelolaan keuangan daerah di BPP Kemendagri," ujarnya.

Sebab, lanjut Maurits, pengukuran ini akan menghasilkan tiga kategori kondisi pengelolaan keuangan daerah, yakni, baik, perlu perbaikan, dan sangat perlu perbaikan. Hasil itu akan disampaikan kepada pemerintah provinsi saban tahunnya melalui keputusan Mendagri. Harapannya, masing-masing daerah dapat menjadikan hasil penilaian tersebut sebagai evaluasi untuk berbenah. "Hasil pemetaan ini sebagai landasan bagi komponen atau lembaga terkait untuk memberikan *treatment*," ujarnya.

Adapun tim pengukuran, selain dari BPP Kemendagri juga melibatkan komponen Kemendagri terkait lainnya. Namun, kata Maurits, tidak menutup kemungkinan, di masa mendatang bakal melibatkan pihak di luar Kemendagri, seperti lembaga *think tank* independen, kementerian, dan lembaga lainnya.

Sementara itu, Kepala Subbidang Perimbangan Keuangan, Nuril Fikri Aulia menyebutkan, tim pengukuran IPKD terus bergerak meski di tengah pandemi. Terlebih, tugas tersebut dapat dilakukan dalam keadaan bekerja dari rumah.

Nuril mengatakan, pencarian data untuk pengukuran tahun ini berlangsung cukup baik. Sebab, pemerintah daerah sudah mengetahui adanya pengukuran IPKD karena sebelumnya dilakukan simulasi. "Informasi tersebut sudah banyak didengar oleh pemerintah daerah, sehingga tahun ini respons pemerintah daerah sudah lebih bagus dibanding tahun sebelumnya," ujarnya. Dirinya berharap, dengan terbitnya Permendagri No 19 Tahun 2020 berbagai kendala data pengukuran bisa teratasi.

■ MUJAENI



Mendagri Buka Rapat Koordinasi Pembinaan Inovasi Daerah

JAKARTA- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, membuka sekaligus memberi arahan pada rapat koordinasi pembinaan inovasi daerah secara virtual beberapa waktu lalu di BPP Kemendagri. Rapat tersebut diselenggarakan atas kolaborasi antara Kementerian Dalam negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan-RB), dan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemristek/BRIN). Kegiatan ini diadakan untuk membangun

sinergitas dari lintas kementerian kepada daerah dalam menginisiasi inovasi pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19.

Hadir sebagai pembicara, yakni Plt. BPP Kemendagri, Agus Fatonni, Deputy Bidang Pelayanan Publik, Kempan-RB, Diah Natalisa, dan Deputy Penguatan Inovasi Kemristek/BRIN, Jumain Appe. Kegiatan ini diikuti oleh kepala daerah provinsi, dan kabupaten/kota, sekretaris daerah provinsi, dan kabupaten/kota, sekretaris BPP Kemendagri, kepala

pusat litbang BPP Kemendagri, kepala badan litbang provinsi, dan kabupaten/kota, kepala Bappeda provinsi, kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah yang membidangi kelitbang, serta aparatur sipil negara (ASN) baik di pusat maupun daerah.

Dalam sambutannya, Mendagri menekankan, inovasi merupakan sebuah keniscayaan agar dapat beradaptasi dengan perubahan. Perubahan harus dapat diikuti, karena negara yang unggul adalah mereka yang mampu beradaptasi. Ia menunjukkan, peringkat Indonesia yang masih rendah dalam hal inovasi. Kemendagri menegaskan akan terus mendorong agar inovasi dapat berkembang, terutama yang dilakukan pemerintah daerah. Sebab, penilaian inovasi secara nasional tidak hanya diukur dari kinerja pemerintah pusat atau non pemerintah, tetapi juga melibatkan peran daerah.

Dalam hal penanganan Covid-19, beragam inovasi juga dibutuhkan. Tak sedikit pihak yang memprediksi pandemi ini akan berlangsung lama. Sampai saat ini, semua pihak tengah berusaha menemukan vaksin atau obat yang ampuh menangani Covid-19. Berbagai sumber menyebutkan, vaksin paling cepat ditemukan pada tahun mendatang. Namun, karena infeksi menyerang banyak orang, sehingga proses pemberian vaksin juga bakal berlangsung lama. “Oleh karena itu diperkirakan penyelesaian Covid-19 ini, akan berlangsung dalam jangka waktu yang tidak sebentar,” kata Mendagri.

Di sisi lain, lanjut Tito, pandemi tak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga melumpuhkan sektor ekonomi karena terjadi banyak pembatasan. Oleh karenanya, dibutuhkan jalan tengah yang mampu menyelamatkan keduanya. Saat ini, seluruh negara di dunia mencari jalan tengah tersebut. Salah satu upayanya, dengan tetap agresif mengatasi penyebaran Covid-19, sekaligus mengondisikan agar aktivitas masyarakat kembali produktif. Hal ini untuk menekan dampak ekonomi agar tidak terlalu terpuruk. Kendati begitu, jalan tengah tersebut diterapkan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dari Covid-19. “Inilah yang kemudian dalam terminologi dunia dikatakan sebagai *new normal*, jadi kehidupan tatanan dunia baru yang normal beradaptasi dengan Covid-19,” ujar Tito.

Dalam konteks tersebut, menurutnya perlu adanya prakondisi agar masyarakat dapat memahami. Pemerintah daerah berperan penting untuk memperkenalkan sekaligus membuat kondisioning tatanan dunia baru yang produktif dan aman dari Covid-19. Tatanan normal baru tersebut, dapat dilakukan dengan menerapkan ber-

agam inovasi. “Pemerintah daerah harus bergerak,” ujarnya.

Guna memunculkan beragam inovasi tersebut, Kemendagri telah menggelar lomba inovasi daerah. Sejumlah sektor yang dilombakan di antaranya, pasar tradisional, pasar modern/mall dan sejenisnya, restoran, hotel, tempat pariwisata, transportasi umum, serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Lomba ini menasar seluruh daerah dalam menyiapkan tatanan normal baru produktif dan aman dari Covid-19.

Dukungan daerah berinovasi juga datang dari Kempan-RB dan Kemristek/BRIN. Deputy Bidang Pelayanan Publik, Kempan RB, Diah Natalisa, mengatakan upaya mendorong lahirnya inovasi di bidang pelayanan publik telah dilakukan melalui beragam program. Langkah ini salah satunya dengan membangun kolaborasi bersama sejumlah pihak, termasuk Kemendagri. Ihtil inovasi penanganan Covid-19, saat ini Kempan-RB juga tengah menggelar apresiasi bagi inovator yang melakukan inovasi pelayanan publik dalam penanganan Covid-19. Kegiatan ini, lanjutnya, diharapkan dapat menginspirasi banyak pihak, baik nasional maupun internasional untuk berinovasi.

Diah menuturkan, mekanisme penjangkaran inovasi pelayanan publik ini menggunakan dua cara, yakni melalui media sosial dan pendaftaran mandiri pada aplikasi Jaringan Pelayanan Publik Nasional. “Apresiasi inovasi pelayanan publik penanganan Covid-19 akan diberikan kepada tiga pihak, yaitu kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, organisasi/lembaga instansi swasta, serta masyarakat secara umum, baik individu maupun organisasi,” ujarnya. Dirinya mengimbau, agar para inovator dapat

mendaftarkan diri jika memiliki inovasi yang dimaksud.

Sementara itu, Deputy Penguatan Inovasi Kemristek/BRIN Jumain Appe menuturkan, membangun inovasi membutuhkan kolaborasi semua pihak. Dirinya mengapresiasi, terselenggaranya kegiatan rapat koordinasi, sebagai upaya mendorong daerah berinovasi. “Tidak bisa hanya didukung oleh pemimpin, tetapi juga perlu didukung oleh seluruh perangkat kerja di bawahnya, termasuk masyarakat,” ujarnya.

Selama ini, Kemristek/BRIN telah melakukan beragam ikhtiar untuk meningkatkan daerah berinovasi. Salah satu upaya ini, yaitu melalui pengukuran indeks daya saing daerah. Di sisi lain, dalam mendorong lahirnya inovasi dalam penanganan pandemi, Kemristek/BRIN juga telah membentuk konsorsium yang terdiri dari lintas kementerian/lembaga dan juga perguruan tinggi. Dari wadah tersebut telah melahirkan beragam inovasi yang bisa dimanfaatkan.

Senada dengan Jumain Appe, Plt. Kepala BPP Kemendagri, Agus Fatonni, menekankan segala upaya akan lebih efektif jika dilakukan dengan berkolaborasi, termasuk dalam membangun daerah berinovasi. Ia sadar, banyak kementerian/lembaga yang melakukan pembinaan dalam mendorong daerah berinovasi. “Hari ini kita mendapat pelajaran, bahwa kita harus berinovasi di segala bidang, lebih-lebih dalam menghadapi situasi pandemi yang tengah melanda negara di seluruh dunia,” katanya.

Hidup di tengah pandemi, lanjut Fatonni, meniscayakan adanya inovasi agar mampu beradaptasi. Karenanya, tatanan kehidupan normal baru yang produktif dan aman dari Covid-19 harus dipersiapkan.

■ MUJAEENI

BPP Kemendagri Gelar Rakornas Kelitbangan secara Virtual

JAKARTA - Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kelitbangan 2020, Rabu (13/5). Berbeda dari tahun sebelumnya yang selalu berlangsung tatap muka, pada Rakornas kali ini dilakukan secara virtual. Kondisi ini akibat merebaknya pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-2019) yang melanda hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia.

Rakornas ini dibuka langsung oleh Plt. Kepala BPP Kemendagri, Agus Fatoni. Ia hadir didampingi Sekretaris Badan, Kepala Pusat Litbang, dan para peneliti. Selain itu, acara ini juga melibatkan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi kelitbangan.

“Hari ini dalam suasana Covid-19 dan perkembangan teknologi, kita bisa bersilaturahmi mengikuti Rakornas dengan memerhatikan protokol kesehatan untuk kebaikan bersama,” ujarnya mengawali sambutan.

Fatoni menyebutkan, tujuan dari Rakornas ini, yakni sebagai wadah koordinasi pelaksanaan tugas-tugas kelitbangan. Pada kesempatan tersebut,



■ Tampak di layar, berbagai peserta mengikuti Rapat Koordinasi Nasional yang diselenggarakan BPP Kemendagri

lanjutnya, bakal membahas isu aktual terkait penyelenggaraan tugas kelitbangan, maupun pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dirinya menegaskan, dari sisi dasar hukum, pelaksanaan fungsi kelitbangan sudah cukup kuat. Hal ini ditandai dengan terbitnya sejumlah regulasi, baik berupa UU, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dari sisi fungsi, lanjutnya, dapat terlihat dalam Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam aturan itu, disebutkan penelitian dan pengembangan berperan dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Hasil dari penelitian itu dijadikan rumusan dasar kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.

Selain itu, penyusunan naskah akademis termasuk regulasi juga mendasarkan pada hasil penelitian dan pengem-

banan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dasar hukum dan peluang yang ada ini, lanjutnya, dapat memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi kelitbangan, baik di pemerintah pusat maupun daerah.

Meski begitu, Fatoni menyadari masih adanya sejumlah persoalan di bidang kelitbangan. Di antara persoalan itu, misalnya pemanfaatan hasil kelitbangan yang masih belum maksimal. Tidak jarang, kegiatan itu hanya menjadi rutinitas. Akibatnya, hasil kelitbangan saat ini belum mampu memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan dan regulasi.

Di sisi lain, dari segi birokrasi kelitbangan juga masih terkesan strukturalis, seperti jenjang birokrasi yang terlalu panjang. Kondisi ini menghambat



■ ATAS: Plt. BPP Kemendagri Agus Fatoni menjadi narasumber pada secara virtual dengan peserta yang diikuti lembaga kelitbangan di daerah.

■ BAWAH: Peserta dari BPP Kemendagri mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Kelitbangan secara virtual

kerja kelitbangan. Keterbatasan juga terjadi pada sumber daya manusia (SDM) yang seringkali belum menjadi prioritas program. Tak hanya itu, anggaran kelitbangan dinilai belum menjadi prioritas, sehingga jumlahnya terbatas. “Kemudian keterbatasan sarana dan prasarana juga dialami kita semua

di bidang kelitbangan,” tutur Fatoni.

Mengatasi persoalan itu, Fatoni mengatakan, perlu adanya kerja sama antara instansi kelitbangan dengan pihak lain. Hal itu seperti yang tengah dilakukan BPP Kemendagri dalam mengkaji jalannya pemilihan kepala daerah (pilkada), yang didukung dengan melibatkan lembaga *think tank* independen.

Dalam membenahi organisasi, juga bisa dilakukan dengan memperkuat aspek fungsional dari semula yang orientasinya masih struktural. Terkait terbatasnya pendanaan, kata Fatoni, dapat diantisipasi dengan membangun kerja sama dengan pihak ketiga, atau memanfaatkan *corporate social responsibility* (CSR) yang ada. Ditambah lagi dengan membuat terobosan baru dalam upaya mengongkosi biaya kelitbangan.

Fatoni berharap, melalui pertemuan ini dapat menjadi langkah awal terbangunnya sinergi dan koordinasi antara BPP Kemendagri, balitbang daerah, atau OPD yang mengurus kelitbangan. Dengan begitu, keberadaan kelitbangan dapat semakin unggul dan menjalankan perannya dengan baik.

Sementara itu, hadir sebagai peserta, Plt. Kepala Barenlitbang Kepulauan Riau, Naharudin, mengapresiasi gelaran Rakornas Kelitbangan 2020, yang tetap dilakukan meski di tengah pandemi. Naharudin berharap, kegiatan serupa dapat rutin dilakukan agar memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya di bidang kelitbangan.

Apresiasi juga datang dari Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah, Provinsi Aceh, Helfizar. Dirinya menginginkan, adanya kolaborasi kelitbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain untuk menangani persoalan anggaran, kerja sama tersebut juga dapat menggaungkan peran kelitbangan secara lebih luas.

■ MUJAEINI

Kemendagri Gelar Diskusi Bahas Implementasi Jaring Pengaman Sosial dan Bantuan Sosial Covid-19

Pemerintah menggulirkan kebijakan jaring pengaman sosial untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19. Kebijakan ini berupa program keluarga harapan, kartu sembako, kebutuhan pokok, kartu pra sejahtera, tarif listrik, dan tambahan insentif perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu diungkapkan, Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), Agus Fatoni, saat membuka gelaran diskusi virtual, Rabu (17/6/2020).

Diskusi tersebut menghadirkan pembicara, di antaranya Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Wali Kota Jambi, Syarif Fasha, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zudan Arif Fakrullah, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Muchlis Hamdi, Kepala Pusdatin Kementerian Sosial, Said Mirza Pahlevi, Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani. Sementara peserta yang terhubung terdiri dari kepala Bappeda provinsi, kabupaten/kota, kepala dinas sosial provinsi, kabupaten/kota, kepala litbang daerah/organisasi perangkat daerah yang membidangi kelitbangan, kepala BPKAD provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat umum.

Dalam sambutannya, Fatoni menambahkan, pemberian jaring pengaman sosial tak lepas dari berbagai kendala. Menyikapi itu, lanjut Fatoni, pemerintah pusat dan daerah terus berinovasi untuk mengatasi persoalan tersebut. Kemendagri juga terus mendorong agar pemerintah daerah dapat terus berinovasi dalam menghadapi pandemi.

Sementara itu, Jaleswari mengatakan, Presiden mengimbau agar dalam penanganan pandemi Covid-19 perangkat pemerintah harus berpegang pada prinsip *good governance*, seperti transparansi dan akuntabilitas. Upaya ini untuk mencapai satu tujuan, yakni menyelamatkan masyarakat, baik di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. “Dalam mencapai tujuan itu pemerintah harus bergerak dengan cepat, karena situasinya betul-betul *extraordinary* (luarbiasa),” ujarnya.

Ia menambahkan, penggunaan satu data menjadi bagian penting dalam menghadapi pandemi, termasuk dalam pemberian jaring pengaman sosial. Data yang andal, katanya, dapat membangun akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Semakin berkualitas data dan informasi yang digunakan, maka tingkat kepercayaan dan kepatuhan publik terhadap pemerintah kian baik. “Data menjadi kata kunci untuk bagaimana penanganan Covid-19 dan menjadi indikator penanganan dan publik juga bisa melihat,” ujarnya.

Dalam pemberian jaring pengaman sosial, Kementerian Sosial (Kemensos) mengacu pada sejumlah data. Said Mirza mengatakan, dalam menyalurkan bansos, Kemensos memiliki program bansos reguler dan bansos khusus Covid-19. Penerima bansos reguler berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Sedangkan bansos khusus Covid-19 dapat berasal dari luar DTKS, baik berupa usulan pemerintah daerah, maupun kementerian/lembaga.

Peran daerah

Berbagai upaya dilakukan pemerin-



■ Plt. BPP Kemendagri Agus Fatoni memimpin acara webinar dan diskusi membahas Pilkada 2020

tah daerah untuk memberikan jaring pengaman sosial maupun bansos kepada masyarakat terdampak. Seperti yang dilakukan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki program *Jogo Tonggo* dengan melibatkan peran masyarakat. Ganjar Pranowo meyakini anggaran yang dialokasikan pemerintah tidak akan cukup memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, pihaknya menggandeng sejumlah pihak untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Selain itu, Azwar Anas, mengatakan dalam melakukan penanganan pandemi, Kabupaten Banyuwangi memanfaatkan program *smart kampung*

yang sudah berlangsung empat tahun. Melalui program ini, Anas mengaku dapat mencegah penyebaran Covid-19, sekaligus memudahkan penyaluran jaring pengaman sosial, dan pemulihan dampak ekonomi. Anas menuturkan, jaring pengaman sosial tak hanya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), tetapi juga didukung oleh peran Aparatur Sipil Negara (ASN). “Sejak sebelum Ramadan kami kumpulkan ASN untuk memberikan paket sembako lengkap,” ujarnya. Data penerima bantuan juga disampaikan secara transparan kepada publik. Masyarakat yang terdampak pandemi, tetapi belum mendapat bantuan, dapat melaporkannya secara daring untuk selanjutnya ditindaklanjuti.

Upaya strategi penyaluran bantuan juga dilakukan Kota Jambi. Syarif

Fash, menyebutkan dalam menyalurkan bantuan, pihaknya mengacu pada DTKS. Selain itu, ia juga menyiapkan ruang bantuan untuk warga yang tidak tertampung dalam data tersebut. Data tambahan itu, didasarkan pada usulan masyarakat, melalui rukun tetangga, lurah, maupun camat. “Dan itu sudah disampaikan ke 35 ribu KK yang tidak dapat bantuan dari DTKS,” ujarnya.

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif, mengatakan, pemberian bantuan sosial perlu memanfaatkan data kependudukan. Sebab, data kependudukan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah tertera keterangan nama dan alamat, sehingga memudahkan penyaluran.

Ia menuturkan, sejumlah kementeri-

an/lembaga, dan pemerintah daerah telah memanfaatkan data kependudukan. Namun, pemerintah daerah masih terbilang rendah dalam hal pemanfaatannya. Hal ini, lanjutnya, perlu terus didorong agar data kependudukan dapat menjadi satu data. Jika pemerintah daerah sepakat memanfaatkan NIK sebagai dasar memberikan bantuan, maka ini dapat membantu memperbarui data.

Sementara itu, Muchlis Hamdi, mengapresiasi sejumlah upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam memberikan jaring pengaman sosial. Kendati demikian, prosedur pemberian bantuan sosial harus perlu diperhatikan, dengan menerapkan upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

■ MUJAEANI

Pilkada Tahun ini dengan Protokol Kesehatan

Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR sepakat, gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tetap berlangsung pada tahun ini. Hanya saja, waktu pelaksanaannya diundur, dari semula 23 September menjadi 9 Desember 2020. Perubahan ini merupakan respons atas merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia. Penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya terus dipersiapkan.

Guna membuka ruang diskusi menyoal persiapan Pilkada di tengah pandemi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), menggelar diskusi secara virtual bertajuk “Kesiapan Pelaksanaan Pilkada 2020”, Rabu (10/6/2020). Hadir sebagai pembicara, Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, Bupati Lebong, Rosjonsyah Syahili, Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Ardian Noervianto, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Budi Santoso, Direktur Eksekutif Persatuan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, serta Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid Tanthowi.

Peserta kegiatan ini terdiri dari, kepala daerah, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota; kepala badan litbang daerah/OPD yang menjalankan fungsi litbang provinsi dan kabupaten/kota; kepala bappeda provinsi dan kabupaten/kota; KPUD provinsi dan kabupaten/kota; Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota; kepala BPKAD provinsi dan kabupaten/kota; kepala biro/kepa-



FOTO: ISTIMEWA/https://lenteratoday.com/

la bagian pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota; para peneliti Badan Litbang Kemendagri dan daerah; P2UPD lingkup Inspektorat Jenderal Kemendagri; ASN Badan Litbang Kemendagri, provinsi dan kabupaten/kota; mahasiswa, akademisi, praktisi dan masyarakat umum.

Plt. Kepala BPP Kemendagri, Agus Fatoni menuturkan, persiapan Pilkada perlu dibahas mengingat pemerintah telah memutuskan penundaannya tetap pada 2020. Alasannya, kata Fatoni, untuk menunjukkan kedewasaan bangsa dalam berdemokrasi. Pemilu yang terjadwal juga menjadi penentu indeks demokrasi sebuah negara. Langkah ini juga sebagai upaya mengurangi praktik kepemimpinan yang dijabat pelaksana tugas, karena kewenangannya terbatas. “Sedangkan kondisi pandemi membutuhkan pemimpin yang kuat dengan legitimasi dari masyarakat,” ujar Fatoni saat membuka rapat tersebut.

Meski begitu, Fatoni menyadari, penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi bukan tanpa tantangan. Ia menyebutkan, sejumlah tantangan yang perlu dihadapi, seperti kesediaan anggaran karena perlu memenuhi stan-

dar protokol kesehatan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta menjaga keselamatan penyelenggara maupun pemilih. Menurutnya, sosialisasi protokol kesehatan yang masif harus terus disampaikan kepada masyarakat. Selain itu, koordinasi antarpihak yang terlibat perlu diperkuat.

Direktur Fasilitasi Kepala Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Budi Santoso mengungkapkan, penundaan Pilkada sudah mendapat dukungan dari Ketua Gugus Tugas Covid-19. Sikap serupa juga ditunjukkan Komisi II DPR RI yang menyetujui Perubahan Rancangan PKPU tentang No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota Tahun 2020.

Tahapan yang sempat terhenti, kembali dilanjutkan pada 15 Juni dengan menerapkan protokol kesehatan. Menurut Budi, terpilihnya 9 Desember sebagai waktu pelaksanaan Pilkada, merupakan alternatif pertama dengan sejumlah pertimbangan. Salah satunya untuk menghindari banyaknya kekosongan jabatan kepala daerah, yang akan

mengganggu roda pemerintahan.

Sementara itu, Pramono mengatakan, KPU terus menyiapkan diri dengan memenuhi sejumlah prasyarat. Merespons perubahan, pihaknya telah melakukan revisi Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal. Revisi ini telah melalui proses peninjauan pendapat, seperti lewat kelompok diskusi terfokus dan uji publik, yang melibatkan partai politik, masyarakat sipil, pakar epidemiologi, Gugus Tugas Covid-19, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kemenkes, dan Kemendagri. “Saat ini tinggal diundangkan Kemenkumham, jadi sudah siap,” ujarnya.

Ihwal aturan pelaksanaan Pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan, KPU juga tengah menyusun PKPU tentang Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19. Substansi PKPU ini terus dikonsultasikan ke Gugus Tugas Covid-19 dan Kemenkes. Tujuannya untuk memastikan penerapan protokol kesehatan yang diatur sudah sesuai ketentuan. “Saat ini draf PKPU ini tengah diajukan ke pemerintah dan DPR untuk dilakukan konsultasi,” ujarnya.

Anggaran

Wacana yang mencuat perihal penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi, adalah soal naiknya biaya penyelenggaraan. Sebabnya, dengan penerapan protokol kesehatan, banyak fasilitas yang perlu dipenuhi oleh penyelenggara.

Secara prinsip, biaya Pilkada diatur dalam UU No 10 Tahun 2016. Menurut, Ardian, peraturan ini mengatur biaya pelaksanaan Pilkada yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Meski begitu, peraturan ini juga memunyai klausul, yang menyebutkan biaya Pilkada dapat dibantu oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Karenanya, Ardian ingin mencermati kondisi keuangan masing-masing daerah dalam menyiapkan Pilkada 2020.

Pemerintah daerah, lanjutnya, perlu menghitung beragam kebutuhan penyelenggara Pilkada. “Bagi teman-teman daerah, pemerintah daerah, KPU daerah, Bawaslu daerah, dan pihak pengamanan untuk saling berkoordinasi mencermati berbagai dinamika, khususnya terkait pandemi Covid-19 yang terjadi di setiap daerah,” tuturnya.

Mendagri, kata Ardian, telah mengarahkan agar kepala daerah yang menggelar Pilkada, dapat mengimbau KPU di daerahnya, untuk mengoptimalkan anggaran yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Upaya ini guna mendata kembali anggaran yang bisa direalokasi untuk membiayai kebutuhan Pilkada yang lebih prioritas.

Ardian berharap, hasil koordinasi penyelenggara di tingkat daerah dapat segera dilaporkan kepada Kemendagri. Hal ini penting, untuk menghitung kapasitas fiskal masing-masing daerah. Supaya, lanjutnya, pemerintah pusat dapat mengambil kebijakan sesuai dengan kondisi tersebut.

Dalam diskusi ini, Titi Anggraini, banyak mengulas tingginya biaya politik terutama yang dikeluarkan oleh peserta Pemilu. Menurutnya, asumsi itu bisa

menjadi mitos atau fakta. Berdasarkan dokumen formal seperti Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), dan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), tidak membuktikan biaya yang tinggi. Pada situasi ini, tingginya ongkos tersebut dapat dikatakan sebuah mitos. Namun, lanjutnya, hal ini bisa menjadi fakta, karena sudah menjadi pengetahuan umum, dan tak bisa dibantah. “Makanya kalau dalam hukum, fakta yang sudah diketahui secara umum oleh masyarakat, tidak perlu dibuktikan lagi,” ujarnya.

Secara regulasi, tambah Anggraini, negara sebenarnya sudah mengantisipasi tingginya biaya Pemilu bagi peserta, seperti memfasilitasi kampanye, melarang adanya mahar politik, dan sebagainya. Namun dalam praktiknya, upaya tersebut dinilai belum banyak memberikan perubahan. “Norma hukum kita masih jauh tertinggal dengan praktik yang terjadi di lapangan,” ujarnya.

Ia menyebutkan, biaya politik tinggi menjadi tantangan di tengah pandemi. Lemahnya kondisi ekonomi masyarakat, rawan dimanfaatkan oleh kandidat. Untuk itu, ia menyarankan agar literasi kepada pemilih ihwal politik bersih harus dilakukan secara terus menerus. Di sisi lain, bakal ada komponen belanja baru yang dikeluarkan kandidat, seperti alat pelindung diri (APD) bagi tim suksesnya saat menggalang suara. Meski bisa diantisipasi oleh kampanye digital, tapi menurut kajiannya, pemilih lebih menyukai model kampanye secara langsung.

Kepala daerah, baik Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany maupun Bupati Lebong, Rosjonsyah Syahili, mendukung pelaksanaan pilkada pada tahun ini. Berbagai persiapan telah dilakukan, seperti menghitung kebutuhan dan mengalokasikan sejumlah anggaran. Mereka mengatakan, akan mengikuti arahan dan kebijakan dari pemerintah pusat.

■ MUJAJENI

IKHTIAR KEMENDAGRI ATASI PANDEMI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
MENERBITKAN SEJUMLAH
KEBIJAKAN UNTUK MEMANDU
PEMERINTAH DAERAH
MENANGANI COVID-19.
MENDAGRI MENGIMBAU AGAR
UPAYA PEMERINTAH DAERAH
SELARAS DENGAN LANGKAH
PEMERINTAH PUSAT



Indonesia tengah berjibaku melawan pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Virus yang hampir melanda seluruh negara di dunia ini, membuat pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan penanganan. Sejak kasus pertama di Indonesia terungkap pada Maret 2020 lalu, angka penyebarannya kian hari makin merangkak naik. Bahkan, pandemi ini tak hanya dialami kota-kota besar seperti DKI Jakarta, tetapi hampir menysasar ke seluruh daerah. Terhitung per 23 Juni 2020, virus ini telah menyebar ke 34 provinsi, 442 kabupaten/kota. Dengan jumlah sebaran dampak 47.896 orang dinyatakan positif, 19.241 dinyatakan sembuh, dan 2.535 meninggal dunia.

Sebagai pembina sekaligus pengawas jalannya pemerintahan daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya memandu pemerintah daerah (pemda) melakukan percepatan penanganan. Salah satu langkahnya, yaitu mengarahkan pemda agar merealokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk difokuskan menangani Covid-19.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menyebutkan dalam skala wilayah penyebarannya, pandemi Covid-19 dinilai terluas selama sejarah umat manusia. Sebelumnya, beberapa pandemi sempat melanda kehidupan manusia seperti *black death* pada abad ke-14 dan influenza pada 1918. Namun, penyebaran kedua wabah tersebut tidak seluas Covid-19. “Mungkin pandemi ini yang terluas semenjak Indonesia merdeka pada 1945,” ujar Mendagri, dalam video yang diunggah laman resmi Kemendagri.

Tito menuturkan, semua negara sedang berupaya membendung penularan dan melakukan penanganan terhadap Covid-19. Antarnegara saling belajar, baik ke negara yang berhasil maupun yang belum berhasil menangani virus

tersebut.

Menurutnya, menghadapi pandemi serupa perang. Hanya saja musuh yang dihadapi tidak terlihat karena merupakan mikroorganisme. Kondisi ini menjadi tantangan dalam memerangi pandemi. Jika perang militer memiliki aturan yang jelas, seperti siapa saja yang harus diserang, tetapi dalam perang ini aturan tersebut tak berlaku. Semua pihak dilibas tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun lainnya.

Serupa perang, untuk menghadapi virus perlu mengetahui karakteristik lawan, seperti kekuatan dan kelemahannya. Covid-19 ini, katanya, memiliki kekuatan dalam penyebarannya yang begitu cepat. Ada tiga jenis metode penularan, pertama melalui percikan air liur. Kedua, kontak fisik langsung dengan pengidap. Ketiga, virus ini mampu bertahan pada objek tertentu, sehingga ketika tersentuh dapat menulari. Tidak heran jika angka penyebarannya terus melonjak.

Meski begitu, virus ini juga memiliki sejumlah kelemahan, seperti sensitif terhadap suhu tinggi, tidak kuat dengan pelarut lemak yang didapatkan dari sabun, lemah terhadap cairan disinfektan, bisa dikalahkan dengan antibodi, dan sebagainya. Beragam kelemahan itu, menjadi catatan penting untuk menghadapi virus tersebut.

Selaras dengan pusat

Mendagri menekankan, untuk menangani pandemi perlu adanya mobilisasi secara nasional, baik antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah dan non pemerintah, termasuk dengan masyarakat. Dalam mempercepat penanganan, pemerintah pusat telah menerbitkan sejumlah kebijakan, salah satunya adalah soal realokasi anggaran untuk mendukung penanganan Covid-19. Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden No 4 Tahun 2020

tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kemendagri menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Permendagri No 20 Tahun 2020, tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Aturan ini memberikan arahan kepada pemda agar merealokasi dan merefocusing penggunaan APBD untuk penanganan Covid-19.

Selain itu, Mendagri juga mengeluarkan surat edaran perihal apa saja yang perlu dilakukan oleh pemda dalam mengatasi Covid-19. Isinya menjelaskan teknis dalam menjalankan Permendagri No 20 Tahun 2020, arahan yang dapat dilakukan, serta protokol di lapangan. Selanjutnya, Mendagri menerbitkan Instruksi Mendagri No 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Isinya pun tidak jauh berbeda dari regulasi sebelumnya, yakni sejumlah arahan kepada pemda untuk menerapkan protokol kesehatan, termasuk menyoal mudik lebaran.

Mendagri menegaskan, kebijakan yang diterbitkan pemerintah pusat harus diikuti oleh pemda. Para kepala daerah juga diarahkan memiliki pengetahuan terkait krisis pandemi, yang telah berdampak pada kesehatan maupun ekonomi. “Saya minta rekan-rekan kepala daerah, selain memiliki rasa bahwa ini suatu krisis, segera mengambil alih kepemimpinan dalam perang di daerah masing-masing,” ujarnya.

Kepala daerah didorong menjadi kepala gugus tugas penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing. Tito mengingatkan, jangan sampai urusan ini justru diserahkan kepada sekretaris daerah atau pejabat lainnya. Sebab kepala daerah memiliki kekuatan penuh dibanding pejabat lainnya di

daerah, baik dari sumber daya maupun kewenangannya. “Gubernur, bupati, walikota harus menjadi kepala gugus tugas di daerah, di bawah komando Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,” katanya.

Supaya hasil kerja maksimal, peran gugus tugas perlu terbagi secara maksimal, seperti pihak yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat, *tracing*, *tracking*, mitigasi, pemeriksaan kepada pasien, termasuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Kebijakan tersebut harus ditangani serius oleh kepala daerah. “Kebijakan-kebijakan untuk proteksi dengan sosialisasi agar masyarakat betul-betul paham, mengenai cara penularan dan bahaya ketika virus ini masuk ke dalam tubuh,” ujarnya. Sosialisasi dilakukan dari tingkat provinsi sampai ke tingkat kabupaten/kota hingga ke masyarakat. Masyarakat, tegasnya, perlu memahami cara dan risiko penularannya, agar paham dan mampu membendung penyebarannya.

Menurut data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, per 23 Juni 2020 gugus tugas daerah sudah terbentuk di 34 provinsi dan 496 kabupaten/kota.

Selain itu, Mendagri mengimbau agar pemda menghitung kebutuhan sarana dan prasana untuk menghadapi Covid-19. Kebutuhan itu misalnya, cairan disinfektan, alat pelindung

diri bagi tenaga kesehatan, fasilitas rumah sakit, dan sebagainya. Ia juga mempersilakan, agar pemda berinisiatif membuat beragam terobosan dalam pencegahan dan penanganan Covid-19. Terobosan itu dibolehkan, selama tidak melanggar peraturan. Guna membangun komunikasi dengan daerah, Kemendagri telah membentuk tim. Tim ini salah satunya berperan mendata kebutuhan apa saja yang tak dapat dipenuhi oleh daerah. Supaya pemerintah pusat dapat segera mencari solusi agar lekas terpenuhi.

Sementara itu, Plt. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, menambahkan, untuk memudahkan pemda menghadapi situasi pandemi, Kemendagri juga menerbitkan buku pedoman umum. Buku ini bersumber dari berbagai literatur, termasuk merangkum upaya penanganan di Wuhan, China tempat pertama menyebarnya Covid-19. “Kita kembangkan dengan situasi dalam negeri, kita keluarkan buku pedoman umum menghadapi Covid-19 ini,” ujarnya

Belajar dari situasi yang ada, Kemendagri juga mengeluarkan buku pedoman manajemen yang berisi strategi bagi pemerintah daerah dalam upaya mengatasi dampak dan penyebaran Covid-19. Lima strategi itu, di antaranya strategi pencegahan penularan Covid-19, strategi peningkatan sistem kekebalan tubuh, strategi peningkatan sistem kesehatan, strategi peningkatan ketahanan pangan dan industri alat kesehatan, serta strategi memperkuat jaringan pengaman sosial. “Lima strategi ini harus dilaksanakan secara barengan oleh pemerintah daerah, sehingga anggaran pemda diinstruksikan lebih fokus kepada penanganan Covid-19 serta beberapa hal strategis lainnya,” ujarnya.

Pandemi

ini telah dinyatakan sebagai bencana nasional melalui keputusan presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020. Dengan keputusan itu, kata Safrizal, maka setiap daerah sudah semestinya menunjukkan kesiapsiagaan untuk menghadapinya. Di internal Kemendagri, para komponen diarahkan agar merefocusing semua anggaran untuk mendukung penanganan Covid-19. Anggaran itu diarahkan pada tiga hal, yakni penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan dukungan penyediaan jaring pengaman sosial.

Safrizal mengatakan, Kemendagri terus membangun koordinasi dengan pemda, termasuk dengan pihak lain yang terkait melalui video *conference*. Kemendagri juga memfasilitasi kementerian dan lembaga lain untuk berkomunikasi dengan pemda. Harapannya dengan begitu, upaya penanganan secara nasional dapat berjalan cepat. Dalam proses penanganan, relawan juga turut dikerahkan sehingga usaha yang tidak dapat dilakukan pemerintah, bisa ditangani oleh relawan.

Selain itu, Kemendagri juga membangun kerja sama dengan beberapa negara. Safrizal menuturkan, Kemendagri menerima banyak bantuan dari luar negeri terutama berupa alat-alat kesehatan, seperti ventilator, masker, dan sebagainya. Tak hanya itu, Kerja sama dibangun pula dengan perusahaan lokal. Misalnya menginisiasi perusahaan yang bergerak di bidang sawit untuk mengolah hasil produksinya menjadi produk kesehatan seperti sabun dan sebagainya.

Kondisi keterpaparan setiap daerah terhadap Covid-19 berbeda-beda. Kondisi itu tergambar melalui pembagian zona dari yang paling terpapar berwarna merah, oranye, kuning, dan hijau. Sementara instruksi Mendagri, menysasar ke semua daerah agar melakukan langkah-langkah penanganan. Ia menyebutkan, semula ada sejumlah daerah yang belum melaku-





kan realokasi anggarannya untuk mendukung penanganan pandemi. Saat ini kata Safrizal, 542 daerah otonom sudah melakukan realokasi anggaran ke dalam tiga program besar, yaitu penanganan kesehatan, mendukung industri kecil, jaring pengaman sosial. Ketiga aspek itu merupakan ruang lingkup yang mesti diperhatikan pemerintah daerah.

Hasil evaluasi Kemendagri, tiap daerah bervariasi dalam melaksanakan instruksi tersebut. Namun, daerah dapat melakukan realokasi berkali-kali ke dalam tiga aspek tersebut. “Jadi bervariasi meski kita sudah instruksikan 50 persen dari belanja barang dan jasa agar dialokasikan penanganan

Covid-19, hasilnya tentu bervariasi ada yang lebih dari 50 persen,” ujarnya. Penerapan ini terus bergerak, daerah yang sebelumnya kurang memerhatikan, begitu daerahnya terdampak sudah mulai memberikan perhatian serius.

PSBB

Guna menghentikan penyebaran yang kian meluas, pemerintah membe-rlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan ini diatur dalam UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah selanjutnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, yang

kemudian diturunkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB. Aturan ini memuat sejumlah ketentuan, salah satunya syarat bagi daerah yang dapat menerapkan PSBB. Daerah terlebih dulu mengajukan kepada Kemenkes yang selanjutnya dinilai oleh pemerintah pusat.

Mendagri mengimbau, kepada daerah yang hendak menerapkan PSBB agar berkomunikasi dengan Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19. Usulan dari pemda, selanjutnya bakal dievaluasi oleh lintas kementerian ihwal skema pembatasannya. Sebab, penerapan ini harus melihat dari sejumlah aspek seperti tingkat epide-

miologinya, efektifitas, ketersediaan sumber daya, dan kesiapan sosial ekonomi budaya.

Terkait penerapan PSBB, pemerintah pusat memberikan pedoman secara umum. Penerapan ini membatasi sejumlah aktivitas, meski beberapa sektor mendapat pengecualian. Misalnya, sektor logistik, energi, dan layanan kesehatan yang dapat tetap berjalan. Pengecualian itu dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Safrizal menambahkan, kondisi setiap daerah berbeda-beda, termasuk tipologi masyarakatnya. Ada masyarakat yang menaati imbauan dengan hanya melalui surat edaran kepala daerah.

Namun, ada pula masyarakat yang baru tertib jika ada aparat keamanan. “Variasi semacam ini biasa terjadi, semakin lama masyarakat mengetahui proses PSBB ini bukan untuk pemerintah. Proses ini untuk kesehatan masyarakat semuanya,” ujarnya.

Kedisiplinan masyarakat merupakan kunci keberhasilan penerapan PSBB. Secara lebih teknis, penerapan PSBB diserahkan kepada Gugus Tugas Covid-19 di daerah. Ia menyebutkan, keberhasilan kebijakan ini dapat dilihat dari penurunan pengidap selama masa inkubasi virus, yakni selama 14 hari. Jika penurunannya signifikan, maka PSBB dinilai berhasil. Namun, bagi daerah yang grafiknya belum menurun, maka kepala daerah dapat memperpanjang masa PSBB-nya bahkan memperketatnya. “Jadi sangat tergantung gugus tugas, dengan mempertimbangkan banyak sekali aspek,” ujarnya.

Selain membatasi aktivitas di sejumlah sektor, upaya ini mesti diiringi dengan *tracing* dan *tracking* kepada pengidap. Hal ini untuk menemukan pengidap terakhir untuk segera dilakukan penanganan. Dengan demikian pandemi di daerah tersebut dapat teratasi. “Oleh karenanya, beberapa evaluasi menunjukkan PSBB berhasil menahan jumlah kasus, kemudian yang sembuh makin banyak,” ujarnya.

Meski berdampak pada menurunnya angka penularan, PSBB rupanya membuat perekonomian melemah. Tak sedikit pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Sementara kemampuan pemerintah untuk memberikan jaring pengaman sosial jumlahnya terbatas. Karenanya, daerah yang angka penularannya menurun, secara bertahap dapat dilakukan relaksasi terhadap aktivitas yang sempat terhenti. Hal ini untuk kembali membangkitkan geliat ekonomi.

Safrizal mencontohkan, kalau selama ini penerbangan ditutup total, barangkali nanti bakal dibuka se-

hari sekali. Relaksasi ini dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, misalnya calon penumpang wajib melakukan *rapid test*, jaga jarak, mengenakan masker, dan sebagainya. “Model relaksasi seperti itu mungkin dapat dilakukan, agar roda ekonomi dan kebutuhan transportasi bisa dilakukan,” ujarnya. Saat berita ini ditulis, sejumlah alat transportasi sudah beroperasi secara terbatas, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Ia menyebutkan, pelaksanaan PSBB selalu dievaluasi setiap saat, baik oleh pemerintah daerah maupun Gugus Tugas Covid-19 nasional. Jika mendapati hal yang seharusnya tidak ada dalam penerapan PSBB, maka Gugus Tugas Covid-19 dapat memberikan peringatan kepada daerah. “Misalnya ada pasar yang masih berkerumun maka diberikan teguran, lalu gugus tugas daerah melakukan aksi,” ujarnya.

Kemendagri juga mengevaluasi, baik sebelum pelaksanaan maupun saat penerapannya. Misalnya terkait pengalokasian anggaran yang dinilai kurang saat akan menerapkan PSBB. Kemendagri bakal meminta daerah untuk memenuhi alokasi anggarannya terlebih dulu. Bahkan, dapat menyatakan pengajuan tersebut tak memenuhi syarat. Di samping itu, Kemendagri juga terus membangun komunikasi dengan daerah, dalam mendukung pelaksanaan PSBB.

Safrizal mengatakan, semua daerah berpotensi terdampak Covid-19. Oleh karenanya, semua daerah harus melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat ihwal Covid-19. Pemahaman itu seperti cara pandemi ini menyebar, tindakan apa yang perlu dilakukan, dan sejumlah tindakan lainnya. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih siap. “Kalau pengetahuan mengenai itu ada, dan mengetahui kelemahan Covid-19, maka gerakan cuci tangan, memakai masker, dan menjadi signifikan hasilnya,” ujarnya.

■ MUJAENI

MENATA PRAKONDISI NORMAL BARU

Sampai saat ini vaksin Covid-19 tak kunjung ditemukan. Pemerintah daerah diimbau menyiapkan prakondisi tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19. Kemendagri mendukung upaya ini melalui lomba inovasi daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian melakukan video conference dengan seluruh kepala daerah, Jumat (29/5/2020). Dalam video tersebut, tersambung pula Menteri Keuangan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Kesehatan, serta Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Pesan penting yang disampaikan Mendagri adalah ihwal adanya lomba inovasi daerah yang digelar Kemendagri, untuk menyiapkan prakondisi tatanan normal baru yang produktif dan aman Covid-19. Kementerian yang terhubung menyatakan dukungannya dengan sejumlah argumen dan saran kepada Mendagri. Prakondisi ini diperlukan agar masyarakat lebih siap dalam beradaptasi di tengah pandemi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menggulirkan wacana penerapan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19. Tujuannya, untuk memulihkan kembali roda perekonomian masyarakat yang sempat

tersendat akibat wabah. Penerapan ini dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan data dan fakta terkait penyebaran pandemi. Tatanan normal baru tidak membuat pemerintah kendur menghadapi *Corona*. Berbagai iktiar tetap dilakukan, termasuk upaya menemukan vaksinnya.

Untuk menuju tatanan masyarakat produktif dan aman Covid-19 ada sejumlah indikator yang perlu diperhatikan. Ada 15 indikator yang menjadi pertimbangan penerapan normal baru produktif dan aman Covid-19. Jumlah itu terbagi dalam 11 indikator epidemiologi, 2 indikator surveilans kesehatan masyarakat, dan 2 indikator pelayanan kesehatan. Setiap indikator diberikan skor dan pembobotan untuk dijumlahkan.

Hasil penghitungan itu, berfungsi untuk mengkategorisasi zonasi ke dalam 4 zona risiko, yakni zona risiko tinggi, zona risiko sedang, zona risiko rendah, dan zona tidak ada kasus. Secara berurutan kategori tersebut ditandai dengan pewarnaan, merah, oranye, kuning, dan hijau. Zona risiko tinggi hasil skor



penghitungannya dari 0-1.80, risiko sedang 1.81-2.40, risiko rendah 2.42-30. Sedangkan zona hijau bermakna tidak tercatat kasus Covid-19 positif atau pernah terdapat kasus, tetapi tidak ada penambahan kasus baru dalam empat minggu terakhir dan angka kesembuhannya mencapai 100 persen.

Menurut data yang disampaikan Anggota Tim Pakar Gugus Tugas Covid-19 Dewi Nur Aisyah saat mendampingi Presiden Joko Widodo jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020, per 21 Juni 2020 terdapat 57 kabupaten/kota dengan risiko tinggi, 157 kabupaten/kota risiko sedang, 188 kabupaten/kota risiko rendah, dan 112 kabupaten/kota tidak terdampak atau tidak ada kasus baru.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengatakan, daerah yang hendak menerapkan tahapan tatanan normal baru harus melalui pertimbangan data tersebut. "Prakondisinya seperti apa, kemudian *timing*-nya kapan, kemudian prioritasnya di sektor apa, semuanya berdasarkan data-data yang kita miliki," ujarnya. Ia menyebutkan data yang dikantongi menunjukkan kondisi yang membaik, tetapi harus tetap waspada.

Sebelumnya, Presiden juga telah mengerahkan personil dari TNI dan Polri untuk ditempatkan di sejumlah titik untuk mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Upaya ini digelar di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota. Dengan begitu, harapannya kedisiplinan masyarakat semakin terjaga dan kurva penyebaran Covid-19 dapat melandai.

Sementara itu, Mendagri mengatakan, berbagai ahli kesehatan baik nasional maupun internasional berpendapat, bahwa pandemi Covid-19 berakhir dalam kurun waktu yang tak sebentar. Sampai saat ini vaksin untuk mengatasi Covid-19 belum ditemukan. Karenanya, dunia tengah mempersiapkan diri untuk beradaptasi

dengan Covid-19. Berbagai negara melakukan inovasi untuk dapat beradaptasi dengan tatanan kehidupan baru. Sebab, tidak mungkin untuk terus menerus melakukan pembatasan secara ketat apalagi *lockdown*, yang juga memberikan dampak negatif bagi kesehatan, ekonomi, psikologi sosial dan lain-lain.

Mendagri menambahkan, upaya adaptasi ini juga sedang dilakukan Indonesia. Sebagai sesuatu yang baru, kata Mendagri, tatanan ini memerlukan tahap pengenalan atau prakondisi agar seluruh masyarakat siap dan mampu beradaptasi. "Pra kondisi ini dilakukan dengan membuat protokol kesehatan di berbagai sektor kehidupan dan melakukan simulasi-simulasi," ujarnya.

Penyiapan prakondisi ini, kata Mendagri, utamanya diinisiasi oleh pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga, juga oleh seluruh pemerintah daerah (pemda). Supaya langkah ini menjadi gerakan bersama secara nasional agar mampu beradaptasi ke tatanan baru tersebut. Dalam hal ini, Pemda berperan penting karena bersentuhan langsung dengan masyarakat di daerahnya masing-masing.

Oleh karena itu, Kemendagri bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan, serta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19/BNPB, berinisiatif mengadakan lomba inovasi daerah dalam penyiapan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 pada 7 sektor kehidupan. Sektor tersebut di antaranya, pasar tradisional, pasar modern, hotel, restoran, tempat wisata, transportasi umum, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Agar adil maka lomba diadakan dengan membagi empat klaster Pemda, yaitu antarprovinsi, antar-



kota, antarkabupaten, dan antarkabupaten tertinggal," ujar Mendagri.

Semua pemda, lanjut Mendagri, diminta membuat video inovasi dengan durasi maksimal 1,5 menit yang menggambarkan protokol kesehatan dan simulasi di sektor yang dipertandingkan. Pemda bebas memilih untuk mengikuti sektor mana saja. Bahkan, mereka dapat mengirim video di semua sektor yang dilombakan. "Untuk membuat video tersebut tentunya pemda harus menyusun protokol kesehatan dengan melibatkan ahli kesehatan dan bekerja sama dengan Tim kreatif dan melibatkan pengelola, influencer, tokoh masyarakat dan *stakeholder* yang digarapnya seperti operator pasar tradisional, hotel, restoran, dan sebagainya," kata Mendagri.

Mendagri menyebutkan, video para pemenang akan disosialisasikan ke publik melalui media massa, termasuk media sosial. Hal ini agar menjadi model bagi pemda lain, serta membangun kesadaran masyarakat untuk berinovasi dan beradaptasi dengan tatanan baru yang produktif dan aman dari bahaya Covid-19.

Selain mendapat piagam penghargaan, setiap pemenang diberikan Dana Insentif Daerah (DID) dengan nominal beragam. Untuk pemenang pertama di setiap kategori dan setiap klaster, daerah diberikan DID sebesar Rp 3 miliar, pemenang kedua Rp 2 miliar, dan pemenang ketiga Rp 1 miliar. Sehingga total pemenang berjumlah 84, terdiri atas juara I, II dan III untuk 7 sektor kehidupan

dan 4 klaster pemda dengan total hadiah DID Rp 168 miliar.

Sampai 15 Juni 2020, telah masuk 2.517 video dari semua pemda. Video tersebut dinilai oleh tim juri gabungan dari Kemendagri, Kemenkes, Kemenpan-RB, Kemenparekraf, Kemendag, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19/BNPB, serta Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Penganugerahan penghargaan pemenang sudah dilakukan pada Senin (22/6/2020) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri. Penganugerahan itu dibuka langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ma'ruf mengapresiasi inisiatif Kemendagri yang sudah menggelar lomba inovasi daerah untuk meny-

iapkan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19. Inovasi, menurutnya, menjadi kunci keberhasilan penerapan era baru yang produktif dan aman Covid-19.

"Mengapa inovasi menjadi penting? Karena (di tengah pandemi) tatanan kehidupan di segala bidang akan berubah drastis. Seluruh bidang ekonomi, akan dilaksanakan dengan cara yang sama sekali berbeda dari sebelumnya," ujar Ma'ruf.

Oleh karenanya, dibutuhkan inovasi dan kreativitas agar kegiatan ekonomi yang produktif tetap berjalan tetapi aman Covid-19. Ia menyebutkan, daerah harus menyiapkan tatanan normal baru tersebut dengan baik. "Wilayahnya harus dipastikan kondusif, selain kegiatan ekonominya harus dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat," katanya.

Ma'ruf menegaskan, saat ini pemerintah tengah mengkaji penerapan tatanan normal baru yang produktif dan aman dari Covid-19. Di sisi lain, tegasnya, pemerintah juga terus berjuang mencegah penyebaran dan menemukan obat serta vaksin untuk menangani Covid-19.

Plt. Kepala BPP Kemendagri, Agus Fatoni menuturkan, dana bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta merupakan pos belanja transfer ke daerah dan dikelola melalui mekanisme APBD. Pemerintah pusat menyalurkan dana tersebut, serta akan dievaluasi tiga bulan ke depan penerapan inovasi daerah.

Fatoni menegaskan, bahwa hadiah berupa DID bisa digunakan daerah untuk kegiatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. "Bukan berarti bebas digunakan begitu saja. Penggunaannya sesuai dengan perundang-undangan dan harus dipertanggungjawabkan," ujarnya.

■ MUJAJENI



BENTUK KONSORSIUM HADAPI PANDEMI

Menghadapi pandemi Covid-19, Kemenristek/BRIN bentuk Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19. Lewat wadah tersebut, pemerintah genjot inovasi dalam negeri. Berbagai produk untuk penanganan Covid-19 pun berhasil dibuat. Kemendagri mendukung upaya ini melalui lomba inovasi daerah.

KALA pandemi Covid-19 merebak di Indonesia, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) bergegas membentuk Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19. Wadah ini terdiri dari lintas kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, rumah sakit, industri serta sejumlah pihak yang fokus di dunia riset dan inovasi. Para peneliti/perekayasa dan dosen yang tergabung didorong untuk menciptakan invensi serta inovasi, sebagai upaya mempercepat pencegahan, pendeteksian, dan merespons penanganan pandemi. Selain itu, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) ihwal Covid-19, juga didorong untuk didiseminasi secara luas.

Lewat wadah tersebut, berbagai produk inovasi telah berhasil diluncurkan dan dimanfaatkan. Peluncuran itu dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-112, 20 Mei 2020 lalu. Presiden meluncurkan sembilan produk utama dari 55 produk hasil penelitian dan inovasi percepatan penanganan Covid-19. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengungkapkan rasa bangganya terhadap produk inovasi yang sesuai dengan kebutuhan untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Riset yang dilakukan oleh konsorsium memang tidak terlepas dari kebutuhan penanganan Covid-19, terutama didasarkan pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan. Para peneliti dan perekayasa dapat mengusulkan beragam riset yang berkaitan dengan kebutuhan tersebut.

Menristek/Kepala BRIN, Bambang Brojonegoro, mengatakan semua negara tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk menghadapi Covid-19. Peralnya, virus ini merupakan jenis baru. Karenanya, upaya menghadapi pandemi ini harus dilakukan secara lebih ekstra. Terutama bagi kalangan peneliti/perekayasa dan dosen agar mampu menciptakan beragam inovasi untuk menghadapinya.

Konsorsium yang dibentuk Kemenristek/BRIN melibatkan banyak pihak dengan kemampuan dan perhatian di bidang penelitian dan inovasi terkait Covid-19. Upaya sinergi ini untuk mendukung dari proses penelitian sampai menghasilkan produk yang mampu diproduksi secara massal dan diserap oleh pengguna. “Pada akhirnya yang paling penting, kita mendorong sinergi dan kolaborasi antarberbagai pihak yang memiliki minat dan kompetensi dalam bidang penelitian sampai inovasi,” ujar Bambang, saat melakukan dialog dengan peneliti/perekayasa konsorsium secara virtual, pada akhir Mei lalu.

Bambang menyadari, mengandalkan anggaran riset yang ada, akan sulit menghasilkan produk sampai bisa diproduksi secara massal. Karenanya, dengan dana yang ada, Kemenristek/BRIN juga terus berupaya mencari mitra industri untuk memproduksi hasil inovasi tersebut, sekaligus menemukan pihak yang mampu menyerapnya.

Ia menyebutkan, secara persentase, saat ini anggaran litbangirap di Indonesia masih terbilang rendah jika dibanding dengan sejumlah negara yang terkenal dengan inovasinya. Namun, dengan keterbatasan itu, dirinya

melihat talenta yang luar biasa dari para peneliti. “Baik peneliti atau perekayasa yang ada di perguruan tinggi, lembaga penelitian, maupun yang kami lihat di swasta,” ujarnya.

Dengan potensi ini, Kemenristek/BRIN berperan untuk mengoptimalkannya melalui koordinasi yang baik. Ia menilai, momen Covid-19 merupakan kesempatan untuk membangun kerja sama tersebut secara masif. Banyak dari para peneliti/perekayasa yang sadar, bahwa persoalan Covid-19 begitu kompleks, sehingga tak bisa diselesaikan dengan segelintir lembaga maupun individu. Keahlian yang dimiliki masing-masing individu harus saling bahu-membahu dan melengkapi satu dengan yang lain agar menghasilkan produk yang andal.

Bambang menyebutkan, dalam hal pendanaan pihaknya melakukan sinergi dengan industri baik dari sisi hulu maupun hilirnya. Dari proses riset sampai menghasilkan prototipe, misalnya. Proses ini didanai oleh Kemenristek/BRIN. Selanjutnya, agar prototipe yang telah diuji dapat diproduksi dengan jumlah besar, maka perlu dukungan dari industri. “Tentunya setelah produknya dihasilkan, kita harapkan ada yang menyerapnya,” ucapnya. Dalam konteks saat ini, pihak yang menyerap produk itu bisa berasal dari Gugus Tugas Covid-19, Kementerian Kesehatan, rumah sakit, atau penyedia fasilitas kesehatan lainnya.

Dengan kolaborasi pendanaan tersebut, lanjutnya, Indonesia bakal mulai mengurangi ketergantungan terhadap produk impor alat kesehatan dan bahan baku obat. Sebab, saat ini angka impor dua kebutuhan itu dinilai masih tinggi. Besarnya ketergantungan tersebut, membuat Indonesia berada pada posisi rentan dalam menghadapi pandemi. Sebabnya, baik alat kesehatan maupun bahan obat-obatan sedang banyak dibutuhkan oleh semua negara.

Oleh karenanya, selain berusaha mendapatkan akses barang, Indonesia perlu membangun inovasi dalam



■ Menteri Ristek/BRIN Bambang Brojonegoro saat melakukan diskusi bersama lintas Kementerian/Lembaga

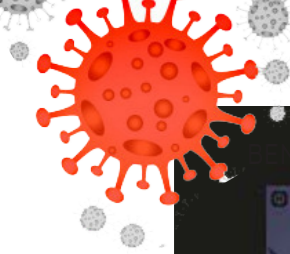
negeri, dengan membuat alat sejenis. Hal ini penting, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dalam penanganan pandemi, melainkan juga jangka panjang untuk bisa mandiri di bidang alat kesehatan dan bahan obat-obatan. “Itulah motivasi

kenapa konsorsium dibuat, dan kenapa berbagai institusi langsung menyatakan bergabung,” ujarnya. Melalui ide ini, dirinya berharap, konsorsium dapat menjadi cikal bakal industri alat kesehatan dan obat, yang nantinya bermuara pada menguatnya kemampuan Indonesia untuk mandiri.

Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 Kemenristek/BRIN, Ali

Ghufron Mukti mengamini, pandemi ini merupakan momen baik untuk membangun kemandirian bangsa dalam memproduksi alat kesehatan dan obat-obatan. Senada dengan Bambang, menurutnya ketergantungan Indonesia terhadap alat kesehatan dan obat-obatan dari luar negeri masih tinggi. Guna membangun produksi massal terhadap hasil inovasi, pihaknya sudah

berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perindustrian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menyebutkan, Indonesia belum memiliki perusahaan di bawah BUMN yang khusus menanganai alat kesehatan. Harapannya, momen ini dapat menjadi langkah untuk mengawali hal tersebut. “Kemarin sudah ada komitmen, jadi ini



suatu momen yang sangat luar biasa,” ujar Ali dalam diskusi bersama *Tempo* secara daring belum lama ini.

Sementara itu, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Hammam Riza, mengapresiasi sinergi yang dilakukan lintas pihak dalam menghadapi pandemi Covid-19. Ia mencontohkan riset inovasi teknologi khusus *testing* yang pembahasannya diawali oleh komunitas *artificial intelligence* (kecerdasan buatan). Forum itu menelisis langkah di beberapa negara yang begitu cepat mengembangkan *rapid test*, dan *testing* lainnya. Rupanya kecepatan itu didukung oleh pemanfaatan kecerdasan buatan. Dari situ gerakan ABCG yakni akademisi, bisnis, *community*, dan *government* mulai terbangun. “Akhirnya *testing* alat kesehatan ini kami koordinir di BPPT, itu ada sekira ada 120-an tenaga peneliti dan perekayasa,” ujarnya.

Hammam mengatakan proses dari hulu ke hilir, yakni dari penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapannya telah dipersiapkan. Dengan begitu ekosistem produksi alat kesehatan dalam penanganan Covid-19 dapat terbangun. Ekosistem yang kuat ini menjawab tantangan dalam membawa ide riset sampai pada hilir. Sebab, selama ini banyak sekali ide ataupun inovasi dari sebuah riset yang tidak sampai ke hilir. Ia meyakini, industri nasional mampu memproduksi beragam alat kesehatan dari hasil riset terse-

but.

Dirinya berharap, Konsorium Riset dan Inovasi Covid-19 ini menjadi kisah keberhasilan kolaborasi seluruh komponen peneliti dan perekayasa untuk membangun kemandirian dan daya saing nasional. “Iptek tidak hanya dilakukan untuk Iptek, tetapi ilmu pengetahuan itu untuk kesejahteraan masyarakat, untuk pembangunan nasional negara kita,” katanya.

Riset tatanan normal baru

Di tengah perjuangan menghadapi pandemi, banyak ahli mengatakan pandemi Covid-19 akan berlangsung lama. Sejauh ini memang belum ditemukan vaksinnya. Sejumlah negara telah menyiapkan tatanan normal baru yakni beradaptasi di tengah pandemi. Indonesia juga tengah mengkaji penerapan tersebut. Presiden Jokowi menyebutnya dengan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19.

Upaya ini tentu memerlukan sejumlah persiapan, termasuk didukung oleh riset yang memadai. Bambang menyebutkan, banyak aspek yang bisa digali terkait riset dan inovasi Covid-19 untuk menghadapi tatanan normal baru. Ia mencontohkan di bidang sosial misalnya, dapat mengkaji kesiapan masyarakat dalam menghadapi tatanan tersebut. Selain itu, penyesuaian mobilitas seseorang melalui pengukuran suhu di masa mendatang perlu dibenahi dengan memanfaatkan

rapid test. Dalam perkembangannya, *rapid test* ini harus didesain lebih cepat, mudah, dan akurat. Supaya setiap pertemuan atau kegiatan, dapat dijadikan alat ini sebagai metode penyaringan. “Siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak sama seperti sekarang kalau naik pesawat harus *rapid test*,” ujarnya.

Selain itu, bisa pula melakukan riset yang menyoroti penerapan protokol kesehatan di sejumlah sektor. Bambang membayangkan, dalam tatanan normal baru, setiap sektor termasuk ekonomi harus didukung penelitian berbasis epidemiologi untuk memastikan skema penerapan protokol kesehatannya. Ia mencontohkan Malaysia, yang sudah kembali membuka kegiatan masyarakatnya, tetapi dengan batasan yang sangat ketat. Misalnya di sektor restoran, mereka membatasi kapasitas pengunjungnya. Di Thailand juga menerapkan kebijakan tertentu saat kembali membuka kegiatan. Kata Bambang, toko di negara tersebut menyediakan plastik bagi konsumen yang bertransaksi menggunakan uang tunai. Hal itu untuk mencegah penyebaran virus yang bisa menempel pada kertas atau material lain. “Itu contoh saja, banyak sekali penelitian yang nanti bisa mendukung kita hidup dengan kebiasaan baru tersebut,” ujarnya.

■ MUJAEINI

PEMENANG LOMBA

INOVASI DAERAH

TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF & AMAN COVID-19

Sektor Pasar Tradisional

KLASTER PROVINSI			
No	Nama Pemda	Peringkat	
		Nomor	Skor
1.	Prov. Bali	1	82,37
2.	Prov. Sulawesi Selatan	2	82,19
3.	Prov. Lampung	3	79,52

KLASTER KABUPATEN			
No	Nama Pemda	Peringkat	
		Nomor	Skor
1.	Kab. Banyumas	1	73,87
2.	Kab. Lumajang	2	70,56
3.	Kab. Semarang	3	68,07

KLASTER KOTA			
No	Nama Pemda	Peringkat	
		Nomor	Skor
1.	Kota Bogor	1	72,07
2.	Kota Semarang	2	70,63
3.	Kota Palembang	3	70,57

KLASTER KABUPATEN TERTINGGAL			
No	Nama Pemda	Peringkat	
		Nomor	Skor
1.	Kab. Lembata	1	40,87
2.	Kab. Seram Bagian Barat	2	39,42
3.	Kab. Pesisir Barat	3	39,11

Sektor Pasar Modern/Mal

KLASTER PROVINSI			
No	Nama Pemda	Peringkat	
		Nomor	Skor
1.	Prov. Jawa Timur	1	83,67
2.	Prov. Lampung	2	74,17
3.	Prov. DIY	3	71,28

KLASTER KABUPATEN			
No	Nama Pemda	Peringkat	
		Nomor	Skor
1.	Kab. Aceh Tamiang	1	68,61
2.	Kab. Kebumen	2	67,48
3.	Kab. Tulungagung	3	67,11

KLASTER KOTA			
No	Nama Pemda	Peringkat	
		Nomor	Skor
1.	Kota Bogor	1	72,93
2.	Kota Sukabumi	2	58,68
3.	Kota Semarang	3	57,78

KLASTER KABUPATEN TERTINGGAL			
No	Nama Pemda	Peringkat	
		Nomor	Skor
1.	Kab. Seram Bagian Barat	1	62,83
2.	Kab. Belu	2	62,81
3.	Kab. Nias	3	61,39

Sektor Restoran

KLASTER PROVINSI			
No	Nama Pemda	Peringkat	
		Nomor	Skor
1.	Prov. Lampung	1	80,22
2.	Prov. DIY	2	79,54
3.	Prov. Jambi	3	77,91

KLASTER KABUPATEN			
No	Nama Pemda	Peringkat	
		Nomor	Skor
1.	Kab. Trenggalek	1	70,87
2.	Kab. Tabalong	2	65,76
3.	Kab. Lumajang	3	64,65

KLASTER KOTA			
No	Nama Pemda	Peringkat	
		Nomor	Skor
1.	Kota Bogor	1	72,33
2.	Kota Tangerang	2	71,77
3.	Kota Jambi	3	67,93

KLASTER KABUPATEN TERTINGGAL			
No	Nama Pemda	Peringkat	
		Nomor	Skor
1.	Kab. Sumba Barat Daya	1	65,47
2.	Kab. Sumba Barat	2	61,59
3.	Kab. Seram Bagian Barat	3	51,91

INFOGRAFIK: FAJAR H



KLASTER PROVINSI

No	Nama Pemda	Peringkat	
		Nomor	Skor
1.	Prov. Jambi	1	75,93
2.	Prov. Kalimantan Utara	2	74,63
3.	Prov. Sulawesi Selatan	3	74,20

KLASTER KABUPATEN

No	Nama Pemda	Peringkat	
		Nomor	Skor
1.	Kab. Trenggalek	1	72,59
2.	Kab. Kebumen	2	70,11
3.	Kab. Sintang	3	69,68

KLASTER KOTA

No	Nama Pemda	Peringkat	
		Nomor	Skor
1.	Kota Pekanbaru	1	76,80
2.	Kota Surabaya	2	73,65
3.	Kota Semarang	3	71,78

KLASTER KABUPATEN TERTINGGAL

No	Nama Pemda	Peringkat	
		Nomor	Skor
1.	Kab. Sumba Barat Daya	1	68,05
2.	Kab. Seram Bagian Barat	2	54,57
3.	Kab. Tojo Una-Una	3	48,80



Sektor Layanan Terpadu Satu Pintu

KLASTER PROVINSI

No	Nama Pemda	Peringkat	
		Nomor	Skor
1.	Prov. Sulawesi Tengah	1	81,39
2.	Prov. Kalimantan Utara	2	78,54
3.	Prov. Jawa Tengah	3	77,08

KLASTER KABUPATEN

No	Nama Pemda	Peringkat	
		Nomor	Skor
1.	Kab. Trenggalek	1	74,55
2.	Kab. Sinjai	2	72,54
3.	Kab. Situbondo	3	72,33

KLASTER KOTA

No	Nama Pemda	Peringkat	
		Nomor	Skor
1.	Kota Bekasi	1	76,85
2.	Kota Bandung	2	54,80
3.	Kota Surabaya	3	53,41

KLASTER KABUPATEN TERTINGGAL

No	Nama Pemda	Peringkat	
		Nomor	Skor
1.	Kab. Nias	1	31,00
2.	Kab. Seram Bagian Barat	2	30,70
3.	Kab. Sumba Barat	3	30,09



Sektor Tempat Wisata

KLASTER PROVINSI

No	Nama Pemda	Peringkat	
		Nomor	Skor
1.	Prov. Jawa Tengah	1	78,48
2.	Prov. Jawa Timur	2	77,70
3.	Prov. Sulawesi Selatan	3	77,50

KLASTER KABUPATEN

No	Nama Pemda	Peringkat	
		Nomor	Skor
1.	Kab. Sintang	1	54,76
2.	Kab. Gunung Kidul	2	54,70
3.	Kab. Trenggalek	3	52,56

KLASTER KOTA

No	Nama Pemda	Peringkat	
		Nomor	Skor
1.	Kota Semarang	1	61,83
2.	Kota Bogor	2	59,28
3.	Kota Pare-Pare	3	57,22

KLASTER KABUPATEN TERTINGGAL

No	Nama Pemda	Peringkat	
		Nomor	Skor
1.	Kab. Sigi	1	32,80
2.	Kab. Rote Ndao	2	30,61
3.	Kab. Seram Bagian Barat	3	27,31



Sektor Transportasi Umum

KLASTER PROVINSI

No	Nama Pemda	Peringkat	
		Nomor	Skor
1.	Prov. Jawa Tengah	1	83,30
2.	Prov. Bali	2	72,60
3.	Prov. Kalimantan Tengah	3	71,70

KLASTER KABUPATEN

No	Nama Pemda	Peringkat	
		Nomor	Skor
1.	Kab. Sintang	1	53,50
2.	Kab. Tegal	2	50,43
3.	Kab. Tapanuli Utara	3	47,00

KLASTER KOTA

No	Nama Pemda	Peringkat	
		Nomor	Skor
1.	Kota Bengkulu	1	62,44
2.	Kota Banda Aceh	2	62,15
3.	Kota Semarang	3	61,55

KLASTER KABUPATEN TERTINGGAL

No	Nama Pemda	Peringkat	
		Nomor	Skor
1.	Kab. Jayawijaya	1	29,22
2.	Kab. Seram Bagian Barat	2	28,11
3.	Kab. Kepulauan Sula	3	26,65

INFOGRAFIK: FAJAR H

TERIMA KASIH

Kepada **34 Provinsi, 331**

Kabupaten, 87 Kota, dan 23

Kabupaten Tertinggal yang telah

berpartisipasi dalam **Lomba Inovasi**

daerah dalam **Penyiapan Tatanan**

Normal Baru Produktif dan Aman

Covid-19.



video inovasi daerah terbaik dapat
disaksikan di Youtube
▶ **Badan Litbang Kemendagri**

Kerja sama K/L :



Seiring dengan kebijakan memulai kebiasaan baru, di beberapa tempat di Jakarta sudah disediakan beberapa fasilitas mencuci tangan, sebagai upaya mencegah covid-19.
FOTO: AJI NURCAHYO



Seorang petugas Satpol PP memantau sejumlah pengendara dan masyarakat. Beberapa kebijakan juga sudah mulai diberlakukan seperti pembatasan jumlah penumpang kendaraan.
FOTO: AJI NURCAHYO

Para pejalan kaki menggunakan masker dan *face shield* saat beraktivitas kembali di era kenormalan baru. *Face shield* berbagai bentuk pun dibuat sebagai alat pelindung Diri terbebas dari virus.
FOTO: AJI NURCAHYO



MASUKAN BERHARGA SEKTOR WISATA

Untuk meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata, pada 2018, Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Bappeda Kabupaten Pandeglang melakukan penelitian terkait pengembangan sektor wisata di Pandeglang. Penelitian tersebut selain memberikan gambaran pariwisata di Pandeglang, juga memberikan rekomendasi untuk pengembangan pariwisata di masa mendatang. Dengan kebijakan yang tepat, pengembangan wisata diharapkan memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian daerah, dan bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Kabupaten Pandeglang menetapkan sektor pariwisata sebagai salah satu *core business* dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Kabupaten Pandeglang juga menjadi salah satu prioritas pariwisata di Kabupaten Banten. Itu tidak terlepas dari banyaknya lokasi wisata yang menjadi magnet bagi wisatawan. Beberapa lokasi wisata di Pandeglang memang sangat beragam, dari mulai wisata alam, budaya, sejarah, hingga religi bisa menjadi pilihan. Seperti Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Pantai Carita, Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Pemandian Air Panas Cisolong, Pemandian Cikoromoy, Wisata Religi Makam Syekh Mansur dan Makam Syekh Asnawi. Dengan begitu, mau tidak mau Pandeglang harus memosisikan diri sebagai kota wisata.

Kabupaten Pandeglang dan Banten identik dengan konsep wisata halal. Hal itu dikarenakan masyarakat Pandeglang yang dikenal religius dengan julukan “kota santri”. Wisata halal

juga menjadi *trade mark* tersendiri di beberapa daerah di Indonesia saat ini, juga menjadi salah satu nilai tambah sektor pariwisata di Pandeglang.

Namun, sejauh ini, konsep wisata halal hanya sebatas memaksakan merek dagang yang tidak memiliki kekuatan *branding*. Konsep wisata halal juga diharapkan tidak menggeser identitas yang selama ini telah tumbuh dengan kearifan budaya setempat. Untuk itu, Bidang Litbang dan Statistik Bappeda Pandeglang, berusaha mengidentifikasi faktor penting pengembangan wisata halal dan kebijakan lainnya mengenai pengembangan wisata di masa mendatang.

Utuy Setiadi Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang mengatakan penelitian mengenai sektor pariwisata sangat penting. Menurutnya, Sektor pariwisata mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.

“Bukti pariwisata menjadi penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah target PAD Pandeglang pada 2018 diproyeksikan meningkat menjadi Rp 423 juta per tahun. Dinas Pariwisata juga menargetkan peningkatan hampir 100 persen



dari tahun sebelumnya, karena jumlah wisatawan yang singgah ke Pandeglang mengalami peningkatan. “Sebenarnya kita berharap kunjungan wisata terus meningkat. Mudah-mudahan ini bisa terealisasi,” ucap Utuy.

Nilai tambah wisata

Menurut Utuy, dari penelitian Bidang Litbang ditemukan beberapa kendala pengelolaan pariwisata di Pandeglang, seperti aksesibilitas dan konektivitas destinasi wisata, terbatasnya sarana transportasi, kurangnya pelayanan dasar, permasalahan investasi dan iklim bisnis pariwisata, keterbatasan akomodasi, kebersihan, dan kesehatan. “Selain itu juga beberapa kendala lain

seperti jauhnya jarak ke lokasi wisata, kurangnya pemandu wisata berbahasa asing, kurangnya tenaga terampil dalam pengelolaan obyek wisata dan pelayanan wisata, kurangnya informasi dan promosi destinasi wisata, serta kurangnya partisipasi masyarakat,” tambahnya.

Sebenarnya dalam mengembangkan pariwisata, Pemerintah Pandeglang sudah membentuk rencana aksi daerah yang dapat memberikan nilai tambah bagi kepariwisataan di Kabupaten Pandeglang. Beberapa rencana aksi tersebut seperti pengembangan wisata halal, penumbuhan dan pengembangan wisata *backpacker*, dan pengembangan

pusat-pusat jajanan dan kuliner khas Pandeglang/Banten, pengembangan ekonomi kreatif seperti musik dan seni budaya tradisional, serta *handycraft* yang terintegrasi dengan pengembangan wisata.

Namun, beberapa rencana aksi tersebut masih menyisakan beberapa permasalahan. Misalnya terkait wisata halal, pemerintah Kabupaten Pandeglang belum memiliki peta kawasan yang memiliki kesiapan menjadi lokasi wisata halal. Padahal, Pandeglang saat ini menurut Utuy sangat cocok dengan wisata halal. Peralannya, jika dilihat dari sisi budaya dan kondisi masyarakat yang ada sangat mendukung. “Misal-

nya, kondisi masyarakat Kabupaten Pandeglang yang agamis, kemudian keberadaan potensi budaya, desa/kampung wisata dengan keunikan dan kearifan lokalnya, dan banyaknya kuliner khas Pandeglang/Banten yang halal sangat mendukung untuk pengembangan wisata halal di Kabupaten Pandeglang.” terangnya.

Untuk itu, agar wisata halal tidak sekadar jargon, maka Bidang Litbang menyarankan, Pemerintah Kabupaten perlu membuat Surat Keputusan dari Bupati Kabupaten Pandeglang tentang Pengembangan wisata halal, penyusunan buku panduan, sosialisasi wisata halal kepada berbagai pihak pemangku

kepentingan dan pelatihan tentang manajemen wisata halal di Kabupaten Pandeglang.

Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong pengusaha bidang pariwisata mengembangkan destinasi wisata alam, pantai serta membangun hotel, penginapan dan fasilitasnya yang sesuai dengan konsep halal *tourisme*. "Artinya memastikan pengunjung muslim tetap dapat memenuhi kewajibannya sebagai umat Islam selama berlibur. Makanan halal, air bersih, dan tempat beribadah menjadi kebutuhan dasar yang harus tersedia," ucap Utuy

Selain wisata halal, wisata *backpacker* sangat cocok dikembangkan di Pandeglang. Pasalnya, Pandeglang didukung oleh beberapa faktor seperti keanekaragaman obyek dan tujuan wisata, terdapat desa/kampung atau kelompok-kelompok masyarakat yang masih menjalankan aktivitas dan budaya asli daerah, penginapan dan biaya hidup yang relatif murah, yang cocok bagi para *backpacker*.

Saat ini beberapa kendala untuk mendukung wisata *backpacker*, misalnya, pemerintah belum memetakan objek wisata desa dan kawasan yang memiliki daya tarik para *backpacker*. Kemudian pemerintah saat ini belum mendorong partisipasi warga tujuan wisata untuk menyewakan rumah tinggal dan mengembangkan daya tarik lokasi bagi wisata *backpacker*. Selain itu, penentuan titik kumpul dan akomodasi komunitas *backpacker* juga belum tampak dalam mendukung wisata tersebut. Untuk itu menurut Utuy, *stakeholder* terkait harus melakukan sosialisasi dan mengundang komunitas-komunitas *backpacker* untuk berkunjung ke Pandeglang. "Promosi juga bisa dilakukan lewat internet dan melalui berbagai media atau cara lainnya," terangnya.

Begitu juga dengan pengembangan wisata kuliner. Pandeglang sebenarnya memiliki makanan atau kuliner khas yang potensial menjadi daya tarik wisata. Beberapa makanan tersebut seperti Leumeung Leupeut, Gipang, Kue Cucur, Kue Jojorong, Kue Pasung, dan sebagainya. Bahkan menurut Utuy,



■ KIRI:
Diseminasi Hasil Kajian Pariwisata dengan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

■ KANAN:
Pembahasan Laporan Akhir Kajian dengan Untirta Banten

Kuliner juga bisa memberikan peluang bagi pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di masa mendatang.

Saat ini pengelolaan UKM belum bisa dikatakan maksimal, terutama dalam menunjang sektor pariwisata. Padahal dengan potensi yang ada, pemerintah bisa mendorong UKM lebih berkembang. Tidak hanya dalam pengembangan kue tradisional tetapi juga dalam hal kerajinan tangan (*handycraft*). Masyarakat Kabupaten Pandeglang tidak kalah kreatif. Sebagai contoh, di Kawasan Ujung Kulon banyak masyarakat memproduksi beberapa kerajinan dari berbagai bahan baku seperti batok kelapa, kayu, dan dari kerang. Kerajinan lain seperti kerajinan kukuk tua di Kecamatan Sindang Resmi. Selain itu, Pandeglang juga memiliki produsen batik dengan ornamen khas Pandeglang.

Selain kerajinan tangan, Pandeglang juga memiliki beberapa seni tradisional yang menarik. Di antaranya Rampak Bedug, Ubrug, Calung Renteng dan Tari/Zikir Saman. Hal ini merupakan potensi pariwisata di Pandeglang. "Pada masa yang akan datang

mungkin perlu dilakukan beberapa hal seperti pemilihan seni budaya, musik, kerajinan khas daerah yang potensial untuk dikembangkan, kemudian pendirian sentra atau pusat-pusat kerajinan khas Pandeglang/Banten di kawasan wisata, pelatihan dan pendampingan bagi sanggar dan pelaku seni budaya daerah, musik tradisional dan kegiatan produksi kerajinan yang ada, penyelenggaraan festival, pameran dan kegiatan lainnya untuk pengembangan dan pemasaran produk ekonomi kreatif, dan penyediaan gerai atau lokasi khusus di kawasan-kawasan wisata strategis untuk promosi dan pemasaran produk *handycraft*," ucapnya.

Iklim pariwisata

Pariwisata saat ini memang menjadi bagian dari gaya hidup. Dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Pandeglang, Sektor pariwisata seharusnya sudah menjadi penyumbang terbesar bagi PDRB. Keseriusan pemerintah setempat diharapkan agar bisa meningkatkan investasi dan iklim bisnis untuk pengembangan destinasi.

Sebagai Kepala Bappeda, Utuy mengakui saat ini sektor pariwisata belum

menjadi penyumbang terbesar bagi PDRB, sektor pertanian masih menjadi yang terbesar. Untuk itu, menurutnya berdasar hasil kajian, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan investasi dan iklim usaha pengembangan wisata di antaranya simplikasi perizinan investasi bisnis pariwisata, mengundang para investor untuk hadir pada event-event kepariwisataan, mendorong Pengusaha lokal/UKM berinvestasi dan mengelola sub-sub kegiatan wisata, kemudian mengiklankan peluang investasi dan bisnis pariwisata melalui internet dan media lainnya. Yang terakhir adalah pendirian sentra atau pusat-pusat kerajinan khas Pandeglang/Banten di kawasan wisata.

Kemudian menurut Utuy, keseriusan juga harus ditunjukkan dengan fasilitas dan sarana prasarana yang memadai seperti peningkatan/pengadaan tempat singgah/istirahat di lokasi wisata. "Selain itu juga seperti peningkatan sarana kebersihan, sarana air bersih, sarana ibadah, penataan tempat khusus restoran/warung makanan-minuman, tempat parkir di lokasi wisata dan sebagainya," jelasnya.



Infrastruktur pendukung pariwisata memang penting. Bagaimanapun, pariwisata merupakan tumpuan untuk mendongkrak devisa negara yang tengah kembang-kempis akibat lesunya perdagangan global. Tugas ini tidak mudah. Apalagi jika melihat data kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia hanya tumbuh rata-rata 14 persen setiap tahun. Sepanjang 2018, jumlahnya mencapai 15,8 juta turis.

Eksistensi Bidang Litbang

Kajian pariwisata di atas menjadi salah satu fokus Bidang Litbang dan Statistik Bappeda Kabupaten Pandeglang pada tahun sebelumnya. Kajian tersebut memberikan gambaran utuh pariwisata Pandeglang saat ini. Kajian Bidang Litbang memberikan gambaran bagi lembaga kelitbang di daerah, kajian dan program harus selaras dengan kebutuhan daerah, sesuai dengan *core business* dan isu aktual daerah.

Ditetapkan pada 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang No 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang, Bidang Litbang dan Statistik Bappeda terus berusaha menunjukkan eksistensinya. Bidang Litbang memiliki fungsi merumuskan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penguatan sistem inovasi daerah yang terkait dengan pemerintahan daerah.

Misalnya, pada dua tahun terakhir, Bidang Litbang membuat beberapa program Penelitian dan Pengembangan IPTEK dan Pembangunan, serta program penguatan kelembagaan jaringan dan budaya inovasi. "Dari kajian tersebut ada beberapa kegiatan turunan seperti riset unggulan daerah, kajian pembangunan strategis daerah, kajian evaluasi pembangunan tematik, penyusunan kebijakan sistem inovasi daerah dan penataan unsur sistem inovasi daerah," ucapnya.

Namun pelaksanaan beberapa program kelitbang selama ini tidak dilakukan secara mandiri, beberapa kegiatan penelitian masih dilakukan secara swakelola dengan pihak ketiga. Pasalnya, sejauh ini Bidang Litbang dan Statistik belum memiliki tenaga fungsional peneliti.

Untuk itu, Utuy berharap besar kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri sebagai Induk Badan Litbang di daerah, untuk memberikan dukungan bagi pengembangan Lembaga Litbang di daerah. Menurut Utuy sejauh ini peran Litbang Kemendagri belum bisa dirasakan dan belum kentara, baik melalui pembinaan maupun penyediaan insentif bagi Litbang Daerah.

"Perlu ada Intensif pembinaan kepada Litbang daerah dan apabila memungkinkan adanya DAK bidang kelitbang," tutupnya.

■ SAIDI RIFKY

LEBIH DEKAT

Temukan Inovasi RDT Covid-19

Berawal dari forum daring yang dibuat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). BPPT mengundang dan mengajak beberapa peneliti Indonesia untuk bergabung melakukan riset dalam usaha penanganan Covid-19. Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. dr. Sofia Mubarika Haryana, (71), menjadi satu dari sekian peneliti yang diajak bergabung. Dirinya tergerak untuk menciptakan alat diagnosis cepat (RDT)



Prof. dr. Sofia Mubarika Haryana, M.Med. Sc., Ph.D

Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM)

Tempat Tanggal Lahir :

Yogyakarta, 7 Agustus 1948

Pendidikan :

S1 Fakultas kedokteran, Universitas Gadjah Mada (1973)

S2 Program Imunobiologi, Auckland University (1985)

S3 Cancer Molecular Biology Program, Kobe University Medical School (1994)

WABAH Covid-19 telah menjangar di Indonesia. Angka penyebarannya saban hari kian melonjak. Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk memperbanyak *rapid test*, khususnya di sejumlah wilayah yang angka kasus penyebarannya tinggi. *Rapid test* memudahkan petugas medis untuk mendeteksi siapa saja yang berpotensi menyebarkan Covid-19, sehingga dapat dilakukan penanganan dan pencegahan. Pada awalnya, Indonesia mengandalkan tes cepat dari alat negara luar. Berkat penelitian yang dilakukan, kini Indonesia bisa melakukan tes tersebut dengan alat hasil kreasi anak negeri. Harganya jauh lebih murah, dengan kualitas teruji.

Semula berawal dari forum daring yang dibuat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

(BPPT). BPPT mengundang dan mengajak beberapa peneliti Indonesia untuk bergabung melakukan riset dalam usaha penanganan Covid-19. Dalam grup mengalir diskusi, ihwal inovasi apa saja yang dibutuhkan untuk menghadapi pandemi Covid-19. Dalam perkembangannya, terdapat enam bidang inovasi penelitian yang menjadi fokus BPPT, salah satunya adalah *rapid diagnostic test* (RDT).

Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Prof. dr. Sofia Mubarika Haryana (71), menjadi satu dari sekian peneliti yang diajak bergabung. Dirinya tergerak untuk menciptakan alat diagnosis cepat (RDT). “Awalnya, saat muncul pandemi Covid-19 kami memang berpikir apa yang dapat kami lakukan untuk ikut membantu penanganan Covid-19. Kemudian tiba-tiba Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menginisiasi untuk melakukan inovasi riset mengenai Covid-19,” tutur Prof Rika, sapaan akrab Sofia Mubarika Haryana.

Untuk mengerjakan RDT ini, dirinya menggandeng peneliti lain, yaitu Prof. dr. Tri Wibawa, Ph.D., Sp.MK(K), ahli virologi sekaligus Guru Besar FK-KMK UGM, juga Prof. dr. Mulyanto, Alumni FK-KMK UGM yang juga seorang peneliti Laboratorium Hepatika Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, juga bergabung, Prof. Dr. drh. Fedik Abdul Rantam, ahli Virologi dan Prof. Dr. dr. Cita Rosita Sigit Prakoeswa, Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya. “Semua sepakat untuk membuat *team work* yang baik, karena *enggak* mungkin tercapai kalau tidak ada *team work* yang baik,” ujarnya.

RDT yang dikembangkannya berbasis antibodi untuk mendeteksi immunoglobulin M (IgM) dan immunoglobulin G (IgG) yang dipro-

duksi oleh tubuh saat melawan virus termasuk Covid-19. Kebetulan sebelumnya, Prof Rika memiliki pengalaman membuat RDT untuk *Epstein-Barr Virus* (EBV) pada pasien dengan kanker nasofaring. RDT tersebut juga dilakukan dengan berbasis antibodi. Ia menyebutkan, kanker nasofaring termasuk kasus yang banyak terjadi di Indonesia.

Rentetan uji coba dilakukan untuk mengukur sensitivitas dan keakuratan produk. Proses pengujian menggunakan 40 sampel serum positif Covid-19 yang diperoleh dari Badan Litbangkes. Hasilnya, tingkat sensitivitas terhadap IgM mencapai

“

SEMUA SEPAKAT UNTUK MEMBUAT TEAM WORK YANG BAIK, KARENA ENGGAK MUNGKIN TERCAPAI KALAU TIDAK ADA TEAM WORK YANG BAIK

angka 96,8 persen. Kemudian uji coba dilakukan pula pada 100 sampel *Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus* (MERS-CoV) dari koleksi RSUD Kota Mataram. Hasilnya angka IgM mencapai 96 persen, sementara IgG 100 persen. Hasil tersebut kata Prof Rika, menunjukkan keakuratan yang tinggi.

Produk yang dibuat juga diuji banding dengan merek komersial yang berasal dari impor. “Ternyata produk komersial yang beredar adalah total immunoglobulin sehingga tidak spesifik, dan tidak seperti total IgM atau IgG yang kami kembangkan. Kemudian kami melakukan proses penca-

rian merek komersial lagi. Akhirnya kami dapat melakukan uji banding dengan merek komersial terbaik,” tuturnya.

Bersama tim, Prof Rika kembali melakukan uji banding dengan merek komersial terbaik. Hasilnya dari 20 sampel dengan positif IgM, produk yang dikembangkan memperoleh 8 positif. Selanjutnya dibandingkan dengan merek komersial terbaik, didapatkan hasil juga 8 positif. “Artinya sampel positif Covid-19 yang sebelumnya diuji dengan PCR (*Polymerase Chain Reaction*) hasilnya 20, maka ternyata yang menghasilkan antibodi baru 8 sampel, kemungkinan sisanya belum terbentuk antibodi,” ujarnya.

Guna memperoleh hasil maksimal, Prof Mulyanto yang menyusun formula RDT Covid-19 kembali memperbaikinya. Tujuannya agar mendapatkan hasil positif kuat, dengan tidak mengubah arti *positivity*-nya. “Dengan data awal uji banding ini, kemudian kami telah melakukan proses *registrasi online* dan proses izin edar,” ujar Prof Rika.

Ia menyebutkan, alat ini sudah diproduksi dengan jumlah terbatas sebanyak 10.000 buah. Sekira 3.000 tes diserahkan untuk dilakukan uji validasi seberapa tinggi akurasi di masyarakat. Uji validasi ini dilakukan di berbagai rumah sakit daerah, yaitu di Yogyakarta, Solo, Surabaya, Semarang, dan teranyar Makassar. Ia menyebutkan, uji lapangan tersebut menunjukkan hasil yang konsisten, dengan uji menggunakan PCR.

Rapid Diagnostic Non-PCR ini, selain dapat digunakan untuk skrining, juga berfungsi memonitor orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, atau post infeksi. Ia berharap, alat tersebut dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan penanganan pandemi Covid-19.

Alat ini menjadi salah satu inovasi yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2020, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Produk ini dinamai RI-GHA yang merupakan singkatan dari Republik Indonesia-Gadiah Ma-da-Hepatika-Airlangga.

Prof Rika mengaku sudah mendapat banyak pesanan dari berbagai pihak seperti Kementerian Kesehatan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa industri juga sudah membangun komunikasi untuk berkolaborasi memproduksi secara massal. Keberadaan industri ini penting, sebab perguruan tinggi tidak memiliki kekuatan untuk memproduksi dengan jumlah melimpah.

Dengan kualitas yang sama, harga RI-GHA jauh lebih murah dibanding produk impor yang saat ini beredar. Ia menyebutkan, satu alat tes impor dihargai lebih dari Rp 250 ribu. Sedangkan produk yang dibikinya, hanya seharga Rp 40 ribu sampai Rp 50 ribu. Industri yang berkolaborasi juga dilarang mematok harga terlalu

tinggi. Prof Rika meminta harga jual alat ini tidak lebih dari Rp 75 ribu.

Prof Rifka berharap, dengan inovasi timnya dapat membantu skrining di berbagai pelosok negeri yang selama ini belum terjangkau. RI-GHA dapat digunakan di tempat umum, seperti pasar, stasiun, sekolah dan lainnya. Hasil tesnya juga dapat segera diketahui sekira 5-10 menit.

Bukti berdaya

Keberhasilan Prof Rika bersama tim menjadi bukti bahwa Indonesia mampu berdaya dalam industri alat kesehatan, yang saat ini diakui Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brojonegoro, impornya masih terbilang tinggi. Prof Rika juga tidak menyangka, jika timnya mampu menghasilkan RDT dalam kurun waktu dua bulan. Namun, lanjutnya, hal itu memang dapat tercapai selagi pemerintah memfasilitasi upaya tersebut.

Dukungan tersebut penting, karena seringkali hasil penelitian hanya ber-

henti pada prototipe. Di sisi lain, kolaborasi lintas pihak dibutuhkan termasuk dengan industri. Hal ini pula yang dilakukan Prof Rika dengan melibatkan banyak peneliti. “Dan orang itu tidak boleh merasa paling hebat dari orang lain, karena satu sama lain saling membutuhkan,” ujarnya.

Prof Rika tidak memungkiri, jika pandemi telah menggerakkan akademisi, ilmuwan, dan industri untuk bekerja sama tanpa memikirkan keuntungan. Dirinya mengapresiasi Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 yang dibentuk Kemenristek/BRIN. Seperti diketahui, konsorsium ini melibatkan banyak pihak, dari lintas kementerian/lembaga, perguruan tinggi, industri, dan pihak lainnya yang tertarik dalam dunia riset serta inovasi. Upaya ini untuk mempercepat penanganan pandemi, terutama mendorong produk inovasi dalam negeri.

■ MUJAENI



Mendagri Minta Polri Dukung Pilkada Serentak 2020 Sukses dan Aman Covid-19

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Polri mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 sukses dan aman dari Covid-19. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Upacara Hari Bhayangkara ke-74 melalui Video Conference di Gedung Persatuan Purnawirawan Polri, Jakarta, Rabu (01/07/2020).

“Khusus untuk Pilkada 9 Desember 2020, saya selaku Mendagri, saya meminta Polri membantu dan mendukung agar Indonesia dapat lolos dari tes demokrasi dalam pandemi Covid-19, untuk menunjukkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat, bangsa petarung,” kata Mendagri

Ia melanjutkan, dengan dukungan Polri, diharapkan Indonesia lolos dari ujian demokrasi di tengah pandemi untuk menghasilkan pemimpin berkualitas. “Meskipun di tengah badai krisis pandemi dan dampaknya, kita bisa menyelesaikan agenda dengan baik tanpa ada penyebaran dan penularan, sehingga menghasilkan pemimpin yang kuat di daerah,” tambahnya.

Sebagai lembaga yang mapan, Polri juga diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan dalam perhelatan demokrasi di 270 daerah itu. “Polri ini adalah lembaga yang mapan, well established, lembaga yang cukup tua 74 tahun, memiliki sistem dan konsep yang jelas, dan doktrinnya sangat jelas untuk mengutamakan keselamatan rakyat dan menjaga stabilitas keamanan, pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, melindungi dan melayani masyarakat. Tanpa disuruh pun kalau ada agenda yang berimplikasi pada stabilitas keamanan, Polri pasti bergerak cepat,” imbuhnya.

Ia juga meyakini di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Idham Azis, Kepolisian RI telah memiliki kesiapan dalam melakukan pengamanan dan mendukung Pilkada Serentak Tahun 2020 di 270 daerah.

Harap Polri tetap solid

Dalam kesempatan yang sama, Tito juga berharap Organisasi Polri semakin solid. “Ada 2 tantangan yang penting, yang utama adalah internal, ini organisasi besar, kehidupan piramida, makin mengerucut sampai pada titik puncak, yaitu kepemimpinan tunggal Kapolri. Nah, saya minta kepada teman-teman di Polri untuk tetap solid,” kata Mendagri.

Sebagai orang yang pernah menjadi orang nomor satu di



jajaran kepolisian itu, Mendagri Tito Karnavian memahami solidaritas adalah kunci dari kekuatan Kepolisian RI. “Kesolidan dari institusi semua dari atas sampai bawah itu adalah kekuatan terpenting, bukan senjata atau peralatan lainnya seperti peluru, bukan. Kekuatan Polri adalah SDM-nya, selain harus profesional, modern, seperti yang disampaikan Bapak Presiden tadi, intelektual, tapi paling utama adalah adanya rasa Korps yang kuat,” bebernya.

Di samping tantangan internal, Mendagri juga meminta Polri mengantisipasi kejahatan lintas batas dan kejahatan lainnya.

“Kemudian yang kedua adalah tantangan kejahatan lintas batas, dunia cyber akan semakin menjadi, perkuat dunia cyber meski Polri sudah sangat kuat sekali. Kemudian kasus-kasus yang merugikan sumber daya alam seperti illegal logging, illegal fishing, corruption, dan kejahatan kontingensi yang berdampak pada kerusuhan,” jelasnya.

Dihadapkan pada situasi pandemi Covid-19, Mendagri juga meminta Polri memberikan atensi terhadap penanganan wabah.

“Yang harus diatensi yaitu masalah membantu penanganan Covid, mendisiplinkan masyarakat, memberi contoh, memberikan bantuan sosial kepada masyarakat,” pungkasnya.

“Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Polri, untuk rekan-rekan yang sekarang masih bertugas, tetap semangat. Organisasi Polri adalah organisasi yang besar, tersebar hingga ke desa-desa, memberikan kontribusi yang sangat penting apalagi di tengah Covid ini,” tambahnya.

■ kemendagri.go.id

Lockdown Corona, Ahli Sebut Emisi Karbon Harian Turun 17 Juta Ton

SEBUAH studi menyebutkan bahwa emisi karbon yang tidak terkendali dapat berpotensi menjadi bencana baru pada tahun 2070. Namun, saat ini di tengah pandemi Covid-19 yang masih terjadi. Ternyata, para ilmuwan dunia menemukan emisi karbon global mengalami penurunan pada April 2020.

Dalam jurnal Nature Climate Change, terungkap bahwa emisi harian merosot hingga 17 persen atau 17 juta ton karbon dioksida secara global selama puncak lockdown pada awal April 2020, dibandingkan dengan tingkat rata-rata harian pada 2019. Penurunan emisi karbon tersebut sama seperti level emisi pada tahun 2006 lalu. Secara umum rata-rata, masing-masing negara mengalami penurunan emisi rata-rata hingga 26 persen di saat puncak lockdown.

Berikut rincian penurunan emisi yang terjadi:

Transportasi darat

Emisi dari transportasi darat seperti perjalanan dengan mobil telah menyumbang hampir setengah yaitu 43 persen dari penurunan emisi global selama puncak lockdown pada tanggal 7 April.

Industri

Emisi dari industri dan pembangkit tenaga listrik, bersama-sama menyumbang 43 persen dari penurunan emisi global harian.

Penerbangan

Dalam sektor ekonomi di bidang penerbangan, pengaruh lockdown selama pandemi Covid-19 ternyata menyumbang 3 persen emisi karbon global atau 10 persen dari penurunan emisi selama pandemi.

Data analisis kajian penurunan emisi CO2

Bersama dengan timnya, Profesor Corinne Le Quere, pemimpin analisis studi dari Universitas East Anglia menganalisis kebijakan tentang lockdown dilakukan di 69 negara, yang bertanggung jawab atas 97 persen emisi karbondioksida (CO2) global.

Le Quere berkata puncak lockdown, daerah yang bertanggungjawab atas 89 persen emisi CO2 global diketahui menerapkan beberapa pembatasan. Data yang mengindikasikan seberapa besar masing-masing sektor ekonomi dipengaruhi oleh pandemi ini kemudian digunakan untuk memprediksi perubahan emisi CO2 fosil untuk tiap-tiap negara, setiap harinya dari Januari hingga April 2020.

Perkiraan total perubahan emisi dari pandemi Covid-19 ini berjumlah 1.048 juta ton karbon dioksida (MtCO2) hingga akhir April. Dari jumlah ini, perubahan terbesar ada di China, di mana saat lockdown dimulai penurunan terjadi sebesar 242 MtCO2. Berikutnya adalah Amerika Serikat yakni sebesar 207 MtCO2, Eropa sebanyak 123 MtCO2 dan India yaitu 98 MtCO2.

Dampak lockdown terhadap emisi karbon

Dampak lockdown pada turunnya emisi tahunan 2020 ini diproyeksikan menjadi sekitar 4 persen hingga 7 persen dibandingkan tahun 2019, tetapi tergantung pada durasi lockdown dan tingkat pemulihan. Jika kondisi mobilitas dan kegiatan ekonomi sebelum pandemi kembali lagi pada pertengahan Juni mendatang, maka penurunannya akan menjadi sekitar 4 persen. Namun jika beberapa batasan tetap diterapkan di seluruh dunia hingga akhir tahun, itu akan menjadi sekitar 7 persen.

Pemimpin analisis studi dari Universitas East Anglia, Profesor Corinne Le Quere mengatakan bahwa penerapan lockdown di hampir seluruh negara selama pandemi Covid-19 dipastikan memiliki efek yang ekstrem pada pengurangan emisi karbon harian. Hanya saja, efek positif tersebut diprediksikan tidak akan bertahan lama. "Lockdown telah menyebabkan perubahan drastis dalam penggunaan energi dan emisi CO2. Penurunan ekstrem ini cenderung bersifat sementara, karena tidak mencerminkan perubahan struktural dal sistem ekonomi, transportasi atau energi," kata Le Quere dalam keterangan tertulisnya. (<https://www.kompas.com/>)

Mengenal Manfaat Yoga untuk Kesehatan Mental

MENURUT artikel di Journal of Affective Disorders, kurangnya aktivitas fisik bisa memicu depresi. Depresi bukan hal yang bisa kita sepelekan karena dampaknya bisa sangat fatal. Menurut National Institute of Mental Health, depresi bisa berdampak buruk pada perasaan, pikiran. Bahkan, depresi juga mengganggu fungsi sehari-hari dan kondisi fisik penderitanya. Depresi terkadang muncul bersamaan dengan masalah kesehatan mental lainnya, seperti kecemasan dan psikosis.

Itu sebabnya, para ahli merekomendasikan kita untuk rutin berolahraga demi menjaga kondisi fisik dan mental kita. Bahkan, riset dalam Journal of Psychiatric Research menunjukkan bahwa aktivitas fisik adalah pengobatan yang efektif untuk depresi. Di sisi lain, riset dalam American Psychological Association juga membuktikan manfaat latihan mindfulness untuk mengobati kecemasan, depresi, dan berbagai gangguan suasana hati.

Manfaat yoga untuk penderita depresi

Yoga merupakan aktivitas yang melibatkan fisik dan praktik mindfulness. Oleh karena itu, latihan ini dinilai efektif untuk pengobatan depresi.

Riset yang diterbitkan dalam British Journal of Sports Medicine telah membuktikan manfaat yoga untuk mengatasi depresi. Dalam riset tersebut, peneliti melibatkan orang dewasa berusia 18 tahun ke atas yang telah didiagnosis mengalami gangguan kesehatan mental. Peserta dalam riset diminta untuk melakukan yoga yang mencakup minimal 50 persen gerakan fisik dalam setiap sesi yang berlangsung antara 20 hingga 90 menit.

Jenis yoga yang dilakukan peserta dalam riset adalah aha, Vinyasa, SVYASA, Kundalini, dan Kripalu. Setelah melakukan analisis data dari hasil uji coba, peneliti membuktikan bahwa yoga memiliki efek moderat dalam mengurangi gejala depresi bagi mereka yang memiliki gangguan kesehatan mental. Manfaat tersebut sangat

terlihat pada penderita depresi dan skizofrenia. Peneliti juga membuktikan, orang yang lebih teratur melakukan yoga memiliki lebih banyak efek positif pada gejala depresi yang mereka miliki.

Tak hanya meredakan gejala depresi, yoga juga memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan mental kita. Berikut manfaat yoga untuk kesehatan mental:

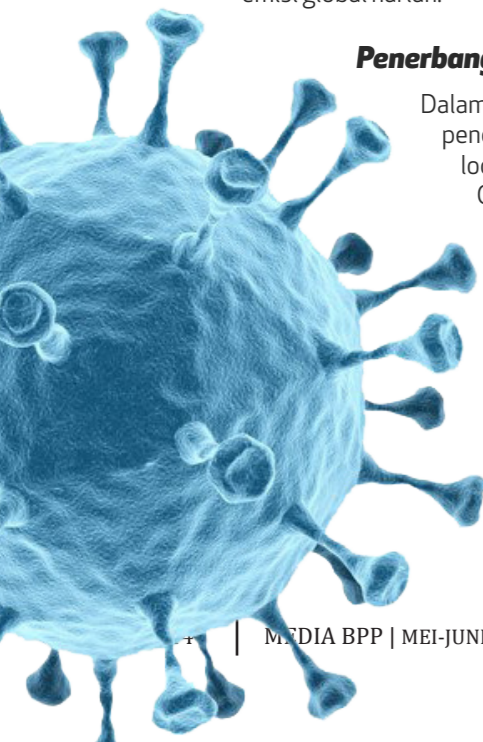
Meredakan stres

Stres menyebabkan lonjakan hormon adrenalin dan kortisol yang dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah. Namun, penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang berlatih yoga secara teratur memiliki kadar kortisol yang rendah.

Riset juga menemukan berlatih yoga minimal tiga bulan dapat menurunkan kortisol dan stres yang dirasakan. Yoga juga terbukti mengurangi sitokin pro-inflamasi yang menyebabkan peradangan.

Meredakan kecemasan

Riset 2010 menunjukkan yoga dapat meningkatkan suasana hati dan tingkat kecemasan. Menurut peneliti, hal ini disebabkan oleh tingginya kadar zat kimia otak gamma-aminobutyric acid (GABA). Aktivitas GABA cenderung lebih rendah pada orang dengan gangguan kecemasan dan suasana hati. Kabar baiknya, aktivitas GABA bisa ditingkatkan dengan melakukan latihan yoga.



Filsuf yang Memandang Dunia dengan Sederhana

“Saat ini, dunia terlihat lebih rumit dan misterius bagimu, tapi jika engkau berubah, dunia ini akan terlihat lebih sederhana. Persoalannya bukanlah tentang bagaimana dunia ini, tapi tentang bagaimana engkau”

Kalimat di atas merupakan kutipan yang diambil dari buku *Berani Tidak Disukai* karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku ini menampilkan dua perspektif berbeda antara seorang pemuda dengan seorang filsuf. Cerita diawali ketika seorang pemuda mendatangi ruang belajar sang filsuf untuk menanyakan arti kebahagiaan dalam hidup. Pemuda bertanya tentang keruwetan hidupnya serta seorang filsuf yang menjawabnya secara detail dan lengkap. Filsuf berpandangan dunia begitu sederhana dan kebahagiaan adalah hal yang mudah diraih, sedangkan pemuda mengatakan bahwa dunia begitu kacau dan rumit sehingga kebahagiaan adalah sesuatu yang sulit diraih.

Penulis menggunakan teori Alfred Adler untuk menerapkan pola pikir sang filsuf. Adler merupakan salah satu tokoh psikolog terkenal abad 19. Nama Adler dikenal karena teori psikologi individual. Latar belakang Adler menciptakan teori psikologi individual adalah karena pengalamannya menjadi dokter dan terapis pasca-perang dunia pertama. Saat itu ia menangani anak-anak korban trauma perang.

Dalam kaitannya dengan teori Adler, buku ini menggambarkan dengan jelas

contoh peristiwa dan kaitannya dengan prinsip teori kepribadian individu. Seperti penjelasan yang dipaparkan filsuf mengenai prinsip superior, minat sosial, dan gaya hidup. Isi buku ini cukup menarik karena dari awal hingga akhir hanya menampilkan dialog seorang filsuf dengan pemuda.

Pertanyaan yang dilontarkan pemuda kepada filsuf sangat mewakili isi hati pembaca buku ini. Seolah-olah menempatkan pembaca secara nyata menjadi tokoh pemuda. Karakter pemuda yang keras kepala dipadukan dengan sosok filsuf yang tenang semakin menambah kesan seru cerita yang disampaikan. Keduanya beradu argumen tentang persoalan-persoalan dalam hidup. Pemuda berusaha membuktikan bahwa teori yang dianut filsuf tidaklah benar, sedangkan sang filsuf berusaha menjelaskan dengan hati-hati agar pemuda paham dengan gagasan yang ia sampaikan. Selain menceritakan kisah hidup pemuda dan filsuf untuk memahami teori Adler, isi dialog mereka disisipi contoh kisah hidup yang dialami orang lain agar lebih memudahkan pemahaman pembaca. Teori kepribadian individu dapat menjadi obat untuk memandang permasalahan dalam hidup menjadi sesuatu yang sederhana dan dapat diselesaikan.



Berani Tidak Disukai: Fenomena dari Jepang untuk membebaskan diri, mengubah hidup, dan meraih kebahagiaan sejati

Penulis : Ichiro Kishimi & Fumitake Koga

Penerbit : First Published in Japan Kirawareru Yuki by Diamond, Inc, Tokyo 2013

PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta (Indonesia)

Cetak : Januari 2020

Tebal : 323 halaman

Penerjemah : Agnes Cynthia

Buku ini terdiri dari lima bagian. Tiap bagian digambarkan satu waktu berdialog tepatnya pada malam hari. Dari awal hingga akhir dialog membahas satu tema besar yang dibagi beberapa sub tema. Walaupun terbagi beberapa sub tema, namun penulis mampu merangkai semua dialog menjadi satu kesatuan. Dialog filsuf dengan pemuda sangat mengalir tanpa ada jeda. Metode penulisan seperti ini menciptakan kesimpulan yang jelas tanpa membuat bingung pembaca.

Malam pertama adalah tentang menyangkal keberadaan trauma. Fakta bahwa orang memiliki trauma masa lalu akan dibantah teori Adler. Menurut filsuf, manusia tidak digerakkan oleh pencetus di masa lalunya, namun bergerak menuju tujuan yang mereka tetapkan sendiri. Filsuf berpedoman pada pendekatan teleologis bukan aetiologis. Teleologis adalah ilmu yang mempelajari tujuan dari suatu fenomena tertentu ketimbang penyebabnya, sedangkan Aetiologis adalah hubungan sebab dan akibat. Manusia harus hidup tanpa dikendalikan masa lalu. Jika dia tidak bahagia sekarang, itu karena dia memilih untuk tidak bahagia.

Malam kedua dialog mengenai persoalan dan hubungan interpersonal. Sejatinnya manusia tidak bisa hidup seorang diri di dunia ini. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Sikap menghindari hubungan dengan orang lain bukanlah solusi untuk menjauhkan diri dari berbagai masalah yang ada. Contoh lain dari Hubungan interpersonal dari sudut pandang yang berbeda adalah tentang perasaan inferior. Perasaan inferior adalah perasaan minder yang bersifat subjektif, membandingkan keadaan diri sendiri dengan orang lain. Perasaan inferior akan berkembang menjadi kompleks inferioritas dan superioritas. Superioritas akan mencipti-

takan individu yang melihat kehidupan sebagai tempat untuk bersaing.

Malam ketiga membahas tentang pemisahan tugas dengan orang lain. Dasar dari persoalan hubungan interpersonal adalah gangguan terhadap tugas orang lain. Perlu adanya pemisahan tugas antara diri sendiri dengan orang lain. Manusia perlu mengetahui apa yang menjadi tugasnya dan apa yang bukan menjadi tugasnya. Jika tidak bisa membedakan keduanya, pikirkan siapa yang akan mendapat konsekuensi dari tugas yang diambil. Seperti contoh seorang anak yang tidak mau belajar dan dipaksa orang tuanya. Belajar merupakan tugas anak dan orang

“

MANUSIA CUKUP FOKUS PADA HAL YANG DILAKUKAN SEKARANG, TANPA MELIHAT MASA LALU ATAU TERLALU PUSING MEMIKIRKAN MASA DEPAN

tua tidak boleh mencampurinya. Jika nilai anak jelek, maka si anak yang akan menanggung risikonya. Orang tua harus menggunakan pendekatan non-interfensi untuk memberi pengertian kepada anak.

Bahasan lain yang menarik dimalam ketiga adalah tentang memenuhi ekspektasi orang lain. Kebanyakan orang di dunia ini hidup dengan meminta pengakuan dari orang di sekitarnya. Manusia kadang bertindak mengikuti ekspektasi orang lain tanpa memikirkan hal yang baik untuk dirinya sendiri. Hal tersebut mendong manusia untuk hidup tidak menjadi diri sendiri.

Malam keempat adalah pertanyaan

tentang pusat dunia. Manusia boleh beranggapan bahwa dirinya merupakan tokoh protagonis dalam sebuah film. Tokoh yang baik dan lakon utama. Namun, yang perlu digaris bawahi adalah protagonis bukanlah pusat dunia. Protagonis sama dengan anggota masyarakat lain bagian dari kesatuan. Terkadang manusia menganggap dirinya sebagai pusat dunia dan memandang orang lain sebagai suruhannya. Mengatakan bahwa “orang-orang akan melakukan semuanya untukku” atau “apa yang bisa orang ini berikan untukku?”. Mengapa tidak mengatakan “Apa yang bisa kuberikan pada orang ini?”

Dan dialog pada *malam kelima* adalah tentang makna “bersungguh-sungguh di sini pada saat ini”. Filsuf mengatakan hidup dengan sungguh-sungguh hanya di sini pada saat ini. Kalimat tersebut menjelaskan bahwa manusia cukup fokus pada hal yang dilakukan sekarang, tanpa melihat masa lalu atau terlalu pusing memikirkan masa depan. Jadi manusia harus bersungguh-sungguh dan tekun menjalani hidup di masa ini. Hasil yang diperoleh dimasa depan merupakan gambaran nyata apa yang dilakukan sekarang.

Dialog di atas merupakan potongan tema yang ada di buku *Berani Tidak Disukai*. Cerita yang disajikan begitu dalam namun ringan. Buku ini cocok dibaca semua kalangan, khususnya mereka yang ingin meraih kebahagiaan. Penjelasan yang dikemukakan Ichiro dan Fumitake melalui teori Adler, menciptakan konsep baru sebuah arti kehidupan. Penggambaran bahasa yang lugas serta tidak bertele-tele akan mengantarkan pembaca pada kesimpulan akhir. Melalui buku ini, pembaca akan paham dengan konsep filsafat dan teori psikologi dengan mudah.

■ FARIDA UBAY SUHADA



Richard Jewell

Sutradara:

Clint Eastwood

Pemain:

Paul Walter Hauser
Sam Rockwell
Kathy Bates
Olivia Wilde
Jon Hamm
Nina Arianda
Ian Gomez
DLL

Produksi:

Malpaso Productions

Distributor:

Warner Bros. Pictures

Tayang:

15 Februari 2020
(Indonesia)



Pahlawan Sesungguhnya

RICHARD JEWELL (Paul Walter Hauser) adalah seorang penjaga keamanan yang menyelamatkan banyak nyawa dari ledakan bom pada acara Olympics 1996 di Atlanta, Amerika Serikat. Ia menjadi pahlawan karena menemukan sebuah tas yang berisi bom dan mengevakuasi kerumunan orang untuk menjauhi area berbahaya. Akibat dari tindakannya, terdapat seratus orang dengan luka ringan dan hanya dua orang meninggal. Saat itu Jewell menjadi *superhero* karena sudah menyelamatkan banyak nyawa warga Amerika. Namun tidak lama dari kejadian itu, pihak FBI mencurigai Jewell telah melakukan semua tindakan jahat ini. FBI juga membocorkan hasil investigasi ke media lokal The Atlanta Journal. Hidup Jewell berubah 180 derajat dan hidup dalam bayang-bayang tuduhan tak berdasar.

Richard Jewell merupakan film *based on a true story* garapan sutradara terkenal Clint Eastwood. Clint Eastwood merupakan seorang sutradara, produser, composer, dan aktor asal Amerika Serikat yang sudah menciptakan deretan film kenamaan. Karya filmnya seperti *The Mule*, *Sully*, *J. Edgar*, *Letters from Iwo Jima*, *Million Dollar Baby*, *Mistic River*, dan masih banyak lagi. Ia telah memenangkan empat penghargaan tinggi Piala Oscar sepanjang karirnya sebagai sutradara. Saat menggarap film Richard Jewell, Clint Eastwood dibantu Yves Bélanger dalam sinematografi, Arturo Sandoval bagian music, dan produksi oleh Tim Moore, Jessica Meier, Kevin Misher dan kru film lainnya.

Diceritakan sosok Jewell sebagai orang yang keras dan sangat disiplin pada aturan. Ia tinggal bersama ibunya Barbara Jewell (Kathy Bates) yang biasa dipanggil Bobi.

Teror bom 1996 di Atlanta menciptakan trauma yang mendalam bagi keluarga Jewell. Hidup Jewell dan Bobi bagaikan *roller coaster*. Satu minggu Jewell menjadi pahlawan Amerika, dibalas dengan mimpi buruk menjadi tersangka utama pemboman oleh FBI. Beruntung ia memiliki Bobi yang selalu menyayanginya dan Watson Bryant (Sam Rockwell) teman pengacaranya yang siap membantu.

Selama hampir dua jam pemutaran film, penonton akan dibuat gemas dengan jalan cerita film Richard Jewell. FBI terus mendesak Jewell untuk mengakui kejadian bom di konser musik olympics. Sikap Jewell yang terlalu kooperatif dimanfaatkan pihak FBI untuk menjebakinya dengan berbagai cara. Mulai dari adegan Jewell dipaksa untuk menandatangani berkas hingga membuat rekaman suara agar terlihat mirip dengan pelaku utama pemboman. Namun berkat Watson, ia

bisa mengatur strategi agar tidak terus menerus dipojokkan FBI.

Tidak hanya FBI tokoh antagonis di film ini, Jewell juga mendapat fitnah dari berbagai media pemberitaan. Berita Jewell menjadi tersangka pemboman, pertama kali disiarkan media lokal The Atlanta Journal oleh Kathy Scruggs (Olivia Wilde) sebagai wartawan yang menulisnya. Sejak berita bodong itu, publik menuduh Jewell sebagai tersangka yang mengaku pahlawan. Siang dan malam rumah Jewell dikerubungi wartawan, sehingga ia dan ibunya kehilangan privasi.

Cerita film ini mungkin terlihat biasa dan klise. Namun karakter Jewell yang diperankan Paul Walter Hauser berhasil memengaruhi penonton. Penggambaran sosok yang jujur, patuh, dan penyayang sukses dibawakannya. *Scane* ketika ia sedih melihat korban pemboman, senang saat menjadi pahlawan, dan ketika dirinya kacau saat

difitnah menjadi tersangka, semuanya sempurna dibawakan Paul. Aktungnya menjadikan film ini sebagai film yang penuh drama. Sebelum membintangi film Richard Jewell, Paul pernah membintangi film komedi Paul Blart: Mall Cop.

Adegan paling keren adalah saat Jewell diinterogasi tiga anggota FBI. Ia menanyakan apakah FBI memiliki bukti kuat untuk mendikannya sebagai tersangka pemboman. Jewell mengatakan, “Aku sebelumnya berpikir jika aparat penegak hukum federal (FBI) merupakan pencapaian tertinggi yang bisa diperoleh seseorang, tapi aku sudah tak yakin dengan itu. Kau tau? Tidak karena semua ini terjadi.” Ketiga anggota FBI yang menyidangnya menjadi diam seketika. Meski sudah lama tayang, film ini bisa menjadi pilihan pembaca untuk mengisi waktu di rumah saat ini.

■ FARIDA UBAY

Pesta Ngarot

Faris Al Faisal*

INI adalah hari Rabu di bulan Desember, saat datangnya pesta ngarot¹. Bunga melati, kenanga, dan bugenvil bertebaran memahkotai rambut gadis-gadis kesinoman². Beberapa gedeng³ padi yang bulir bijinya padat menguning seperti betis gadis berkebaya itu, dipikul dalam cepon bambu oleh pemuda-pemuda berpakaian komboran⁴ hitam. Dan orang-orang tua yang mengiring arak-arakan pun tak kalah senangnya. Di dalam dada mereka tumbuh serumpun harapan, musim panen padi yang akan datang bisa lebih baik lagi. Ada utang di warung yang menggunung seperti tumpukan piring kotor yang belum dicuci, belum terbayar. Anak-anak mereka—gadis dan bujang ngarot—telah menemukan pilihannya, akan dinikahkan setelah panen. Belum lagi, menghadapi musim hajatan tiba, tentu membutuhkan banyak uang dan beras untuk selamatan maupun kondangan ke sanak dan kerabat. Impian itu seluas mata memandang, menghampar hijau seperti sawah yang baru ditumbuhi wini⁵.

Namun, saat penantian dan pengharapan itu tiba tepat di depan mata, padi-padi yang sudah mletik⁶ kuning bagai matahari pagi, gagal panen. Batangnya lemas terkulai, bijinya kering tak berjelai. Cita-cita itu mendadak musnah, terbakar seperti jerami padi yang meninggalkan asap yang perih di mata, menyedak di lubang hidung, menyesak di dada, dan membuat jelaga pada wajah.

Sebab kemarau memanjang. Sungai dan aliran irigasi mengering. Sementara bendungan dan waduk yang selama ini membantu mengairi sawah saat musim kemarau, mengalir entah ke mana. *Kuwu, Raksa Bumi*⁷, dan pamong desa yang bertugas mencari air tak sanggup mengawal arusnya sampai ke pematang. Padahal, uang puluhan juta hasil swadaya masyarakat untuk membeli air sudah digunakan

untuk membayar, tetapi air tak sampai ke petak sawah. Mereka kalah oleh mafia-mafia air yang membelokkan aliran sungai pada pintu air yang lain. Kepada yang berani membayar lebih besar tentu saja.

¹Upacara adat menyambut musim tanam padi yang terdapat di Desa Lelea, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat

²Peserta ngarot (biasanya bujang dan gadis)

³Seikat

⁴Pakaian khas petani lelaki

⁵Benih padi

⁶Merebak

⁷Perangkat khas desa di bidang pertanian



Ilustrasi: Istimewa

AGUNG tertawa terbahak-bahak. Seisi warung pun terpingkal-pingkal mendengarnya sambil mendandakan cangkir kopinya hingga berampas. Pemilik warung pun menyeduhkannya kembali. Bagi lelaki-lelaki yang biasa berkumpul menjaga pintu air, tak satupun yang tak mengenalnya. Ia adalah mantri air yang bertanggung jawab atas debit air—termasuk mempermainkan alirannya sesuai kepentingannya. Selain itu, ia pun adalah lelaki yang gemar memperistri gadis-gadis desa setelah orang tuanya terjerat utang.

Tak terbilang dengan jemari tangan, berapa jumlah perawan kampung yang masih lugu dan polos telah dinikahinya. Semua tentu bukan karena alasan untuk ibadah, melainkan mengumbar nafsu syahwat yang tak tercegah. Umur pernikahannya pun tak pernah panjang, mirip dengan usia padi dari tanam sampai panen. Setelah itu ia akan mencari sawah yang lain. Yang lebih subur dan cocok untuk ditanam.

“Kalian tahu, sebentar lagi aku akan memperistri Kartisem. Anak gadis Samani yang bapuk⁸ itu.”

“Isem, Pak? Mantap itu pak Mantri! Ia memang kembang desa yang sedang mekar-mekarnya. Wangi!”

Seisi warung kembali pecah. Terpingkal-pingkal mereka mendengar ujaran Hendri, salah satu pegawai kepercayaan mantri Agung.

“Orang tuanya tak akan sanggup lagi membayar utang-utangnya padaku. Sawahnya tak akan pernah panen. Dan aku akan menagihnya. Kalau tak sanggup, biarlah anak gadisnya menjadi penebusnya.”

“Pak Mantri memang jagonya. Mantap! Jangan lupa undangannya, Pak!”

SEBENARNYA, sekalipun panen gagal, tak membuat musim hajatan terpenggal. Orang-orang tetap menggelar pesta khitan maupun pernikahan siang dan malam, tiga hari berturut-turut dengan hiburan *tarling*, *sandiwaru*, *sintren*, maupun organ tunggal. Barangkali hidup di tanah lumpur yang di dalamnya *Dewi Sri* tumbuh, menjadikan petani-petani senantiasa tak pernah putus harapan untuk bertemu dengan musim kebaikan. Diolah kembali tanah itu, seperti Adam dan Hawa menanam sayur dan buah. Sampai tumbuh padi, menguning dan memanennya.

Namun, menjadi petani pun tak semudah membayangkannya—menebar benihnya, merawat tumbuhnya, dan memetik hasilnya. Bercocok tanam sekarang semakin tak menentu. Saat padi yang ditanam dengan jerih payah berlumpur dan bermandi keringat matahari mulai tumbuh, padat berbiji dan mulai menguning, tiba-tiba datang hama. Mulai dari tikus, penggerek batang, keong mas, wereng, walang sangit maupun burung pemakan biji padi. Jika semua itu lolos, masih ada yang menghantui, yaitu air. Apakah artinya padi dengan biji yang menguning jika di tengah jalan air tak cukup sampai menunggu musim panen tiba? Musim tak dapat lagi ditafsir dan diprediksi. Seringnya simbol dan mitos pertanian tidak lagi sesuai dengan kebiasaan. Seperti migrasi burung bangau ke barat tidak lagi dimaknai sedang menjemput hujan. Musim kemarau tetap memanjang.

Seperti hidupnya yang selalu menanam, petani pun mulai menggali utang dan pinjaman ke sana ke mari. Maka mulailah Samani mengenal mantri Agung. Lelaki petani yang sudah setengah baya itu meminjam uang untuk modal membeli benih padi dan biaya perawatan serta obat padi sampai menunggu saat panen tiba.

“Angin barat campur angin, edan keparat masih mending kang dingin. Berkali menunggu harapan bertemu musim kebaikan, berkali itu pula cadangan air tak pernah cukup sampai musim panen. Samani dan petani lain lemas. Mukanya memelas. Siapa yang mau memberi belas?”

“JADI demikian maksud saya,” ucap mantri Agung penuh maksud terselubung. Matanya melirik ke sebuah figura yang diletakkan di atas sebuah *bufet* kayu di mana foto Isem terperangkap di dalamnya.

Ada sebuah hasrat yang menjijikkan sebenarnya, ketika melihat lelaki yang begitu bernafsu memburu perempuan. Padahal ia tidak muda lagi, lebih tepatnya menjadi ayah angkat bagi Isem karena umurnya pun sepadan dengan bapaknya.

“Tapi anak saya masih kelas 1 SMA, pak Mantri,” jelas Samani memberi alasan.

“Itu tidak jadi soal. *Sampeyan* tinggal pilih, dilaporkan polisi atau anak gadismu kujadikan istriku. Beres, kan? Hutangmu lunas. Bahkan, aku akan memberimu modal lagi!”

“Sebentar, Pak! saya ingin bicara sama Isem dulu.”

“Silakan! Jangan lama-lama, saya ada pekerjaan lain!”

Di dalam kamarnya, Isem menangis. Ia tidak sampai hati bila bapaknya dijeruji. Namun, ia pun sulit untuk menerima mantri Agung untuk menjadi suaminya.

“Bagaimana Isem, mantri Agung sudah lama menunggu?”

“Benar Pak, utang-utang Bapak akan lunas?”

Tanpa berkata, bapaknya hanya mengangguk. Kepalanya tertunduk. Ia tidak tega sebenarnya menjadikan anak gadisnya sebagai barang pelunas.

DI SEBUAH jalan yang menghubungkan perkampungan dan pesawahan, di bawah pohon rindu, tampak Isem sedang berbicara dengan seorang lelaki muda bertopi caping. Lelaki itu adalah Agus. Pemuda desa yang dijumpainya dalam pesta ngarot kemarin. Sebenarnya ia lebih banyak terisak dan menyeka air matanya ketimbang bicara.

“Kirik kuh! Jadi mantri Agung ingin memperistrimu. Bajingan!”

“Sabar, Kang! Kita bicarakan persoalan ini dengan baik-baik.”

Pembicaraan keduanya baru benar-benar berakhir setelah matahari sore hilang ditelan gundukan bukit di ufuk barat sana. Malam mulai gelap. Seakan menyiratkan hubungan keduanya yang mulai suram. Gelap dan sunyi.

INI pesta ngarot kelima setelah terakhir Isem mengikutinya. Kini ia tampak berada dalam riuh rendah orang-orang yang menyaksikan arak-arakan gadis dan bujang ngarot mengelilingi jalan desa. Seorang gadis kecil—benih yang ditanam mantri Agung yang dinamainya Sarmini—yang usianya sekitar 4 tahun terlihat kepanasan dalam gondongannya. Melihat gadis-gadis berkebaya dan berselendang itu, Isem hanya bisa mengenang saat-saat dulu ia bersangul dan bermahkotakan bunga, dipuja-puja sebagai gadis kesinoman. Namun sekarang, bunga itu telah lama layu bahkan mati. Ia pun tidak ingin lagi mengingat-ingat pernikahannya yang telah hancur sesaat setelah ia mengandung. Suaminya pergi, kawin lagi. Dan yang sedih dari yang paling

“MUSIM TAK DAPAT LAGI DITAFSIR DAN DIPREDIKSI. SEPERTI MIGRASI BURUNG BANGAU KE BARAT TIDAK LAGI DIMAKNAI SEDANG MENJEMPUT HUJAN. MUSIM KEMARAU TETAP MEMANJANG”

sedih, bapaknya pun pergi menyusul mending istrinya setelah mengetahui perangai buruk menantunya.

Entah ke mana perginya mantri Agung sekarang. Kabar terakhir menyebut ia dipindahtugaskan karena desakan petani-petani yang mendemonya sebab berlaku tidak adil soal pembagian air. Adapula yang menyebut ia dipecat. Bahkan berita terakhir, mantri air itu ditemukan tewas di tempat lokalisasi karena pengaruh minuman keras yang dioplos. Semua memang hanya kabar angin yang belum tentu kebenarannya. Namun, apapun yang terjadi, Isem sudah tak ambil peduli lagi. Baginya, lelaki itu sudah dianggap mati.

Hanya Sarmini yang menjadi pusat perhatiannya. Sampai-sampai ia tak mengetahui ada sepasang mata setajam burung elang di antara kerumunan pengunjung ngarot yang terus-menerus memperhatikannya. Mengawasi gerak-gerik perempuan dan anaknya.

Sarmini merengek minta dibelikan tahu bulat, es tebu, dan balon gas yang menyerupai *princess*. Isem tampak membuka berkali-kali dompet kecilnya. Memeriksa kantong saku di celana atau bajunya. Namun tampak tak menemui hasil yang diharapkan.

“Ini Mang uangnya, biar saya yang bayar.”

Isem meneloh ke arah lelaki berpakaian komboran hitam yang memberikan selebar uang kertas lima puluh ribuan kepada penjual. Ia seperti mengenalnya, tapi di mana?

6/

PESTA ngarot tahun ini membawa berkah. Musim tanam padi telah usai. Petani-petani kembali bekerja keras mengolah sawah sebaik-baiknya. Mereka gembira ketika melihat rumpun padi mereka mulai berbiji serta menguning.

Di sebuah *ranggon*⁹, Isem yang ditemani Sarmini terlihat sedang menyiapkan makan siang—nasi putih, ikan asin, sambal, dan sayur asem—untuk lelaki yang kini menjadi suami dan bapak bagi anaknya.

“Ayo kang Agus, makan dulu, mumpung masih hangat.”

Lelaki itu tersenyum mendengarnya. Setelah mencuci tangan di sungai ia pun mendekat. Diciumi Sarmini dengan penuh kasih dan sayang. Gadis kecil itu dengan riangnya

⁹Gubuk kecil di tengah sawah

tertawa. Lucu dan menggemaskan.

“Wah, harum sekali aromanya! Menambah selera nafsu makanku saja.”

“Iya Kang, ayo kita makan bersama-sama.”

Isem menatap mata lelaki itu dan lelaki itu pun membalasnya dengan senyum penuh arti. Lima tahun yang lalu keduanya bertemu dalam pesta ngarot. Dan hari ini mereka telah hidup bersama. Barangkali benar, keduanya telah mendapat berkah dari pesta ngarot—dijodohkan oleh adat dan budaya leluhur mereka.

7/

CAPUNG-capung merah begitu banyaknya beterbangan di atas hamparan sawah yang sudah siap panen. Menandakan harapan baru tumbuh seiring menunggu musim panen tiba. Mereka seperti petani-petani yang riang gembira memotong padi dengan ani-ani maupun *cengkrong*¹⁰. Siul burung pipit dan bondol terdengar nyaring dan berhamburan dari sarangnya di tengah batang-batang padi setiap kali rumpunya yang berbiji padat dilepaskan dari tangkainya pada sebuah *gebodan*¹¹.

“Burung! burung!” seru Sarmini dari *ranggon* sambil menunjuk-nunjuk ke arah terbangnya makhluk kecil itu.

Isem dan Agus tersenyum melihat tingkah anaknya. Wajah-wajah yang mulai cerah setelah sekian lama dalam lelah.

Di sawah yang lain, petani-petani tersenyum gembira saat menghitung puluhan karung berisi gabah yang ditaksir memiliki kualitas beras yang berharga tinggi.

Seminggu kemudian, di halaman lebu atau kantor kepala desa, digelar sedekah bumi—selain zakat pertanian—sebagai ungkapan syukur atas kemakmuran. Bagi petani, hidup pun adalah saling berbagi. Sebagaimana tanah yang selalu memberi kehidupan bagi mereka.

Bulan Desember pun datang, pesta ngarot kembali digelar untuk menyambut musim tanam padi dengan serumpun harapan yang baru. Menebar benih kehidupan di tanah berlumput dan sepetak cita-cita untuk tumbuh lebih maju.

¹⁰Pisau pemotong padi berbentuk seperti celurit kecil

¹¹Alat untuk melepas biji padi dari tangkainya dan terbuat dari kayu

Komik

BANG PEPE



*FARIS AL FAISAL lahir dan tinggal Indramayu, Jawa Barat, Indonesia. Bergiat di Komite Sastra Dewan Kesenian Indramayu (DKI) dan Lembaga Kebudayaan Indramayu (LKI). Menulis fiksi dan non fiksi. Karya fiksinya adalah novella Bunga Narsis Mazaya Publishing House (2017), Antologi Puisi Bunga Kata Karyapedia Publisher (2017), Novelet Bingkai Perjalanan LovRinz Publishing (2018), dan lainnya. Tulisannya tersiar berbagai media cetak dan online. Baik lokal, nasional maupun Malaysia. Email ffarisalfaisal@gmail.com, WA 0811-200-7934/ 085224107934.

Menimbang Prasyarat dan Manfaat Penggunaan E-Voting dalam Pilkada

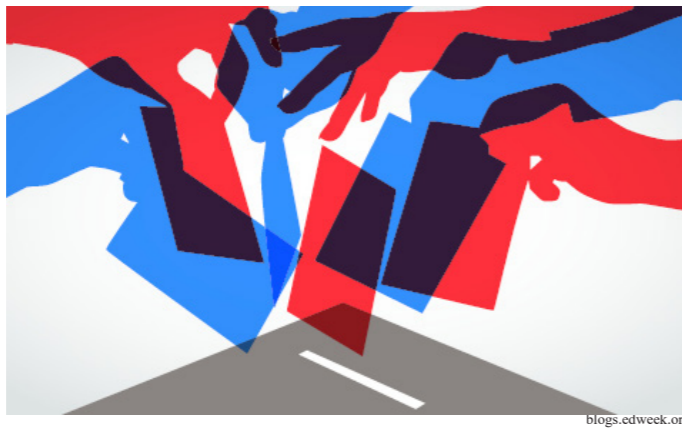
Ray Ferza

Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri

Pada 23 Januari 1973, *the House* di Amerika Serikat menggunakan pemungutan elektronik (*electronic vote*) bersifat mekanikal untuk pengambilan keputusan terhadap Undang-Undang tentang reorganisasi legislatif (*the Office of the Historian, 2020*). Sejak saat itu, teknologi *e-voting* mulai berkembang dengan pemutakhiran-pemutakhiran yang semakin canggih. Pada 2001, Czakowski dan Kaczmarczyk mengungkapkan bahwa *e-voting* adalah pemungutan suara dengan menggunakan metode elektronika yang meliputi perangkat komputer dan jejaring *internet*.

Secara konstitusional, Indonesia mengenal nilai-nilai yang diakronimkan sebagai Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia serta Jujur dan Adil) dalam pelaksanaan pemilihan umum. Sementara peneliti *e-voting* Makara Hapsari (2017) mensintesis suatu prasyarat ideal bahwa kaidah *e-voting* yang akan diterapkan di Indonesia harus berlandaskan 20 kaidah, antara lain *Cost-effective, Unique, Authentication, Certifiable, Transparent, Accessible, Simple, Reliable, Non-Coercive, Flexible, Data Integrity, Verifiable, Auditable, Accurate*, Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia serta Jujur dan Adil (Luber Jurdil).

Berdasarkan data per februari 2015, terkonfirmasi dari 123 negara yang menjadi sampel riset *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* hanya 21% yang mempertahankan *e-voting*. Lebih dari 70% negara sampel tidak menggunakan *e-voting* bahkan sekitar 6% negara cenderung meninggalkan *e-voting* sebagai instrumen pemilihan umum di negaranya. Pengalaman Jerman merupakan yang paling menarik karena Mahkamah Konstitusi Jerman memutuskan *e-voting* sebagai praktik inkonstitusional. Hal ini ditinjau dari literasi terhadap *e-voting* bersifat eksklusif, artinya pengawasan pemilu hanya mampu dikuasai oleh segelintir orang yang paham teknologi informasi.



blogs.edweek.org

Pasang Surut E-Voting Di Dunia

Sebagai perintis teknologi *e-voting* pada pengambilan keputusan di *the House* pada 1973, Amerika Serikat telah benar-benar menerapkan *e-voting* pada 2004. Ketika itu, banyak kegagalan yang terjadi. Pemilih tidak bisa memverifikasi apakah mesin benar-benar merekam pemilihan mereka atau

tidak dan panitia pemilu tidak mau untuk melakukan hitung ulang. Kala itu, persoalan keamanan pemilihan betul-betul menjadi isu penting. Permasalahan juga tidak berhenti pada mesin tetapi juga pada soal sumberdaya manusia yang dianggap kurang memahami cara kerja dari mesin *e-voting*. Sampai sekarang Amerika Serikat masih menerapkan *e-voting* pada beberapa negara bagian, sementara sejumlah negara bagian lainnya tidak menerapkan.

Pengalaman Amerika Serikat bukanlah satu-satunya. Pada 1994, Belanda gencar mensosialisasikan *e-voting*. Penggunaan dari teknologi ini diekspektasikan memberikan kontribusi positif dalam implementasi pemilihan umum. Urgensi *e-voting* di Belanda dilatarbelakangi oleh kebutuhan publik belanda untuk memiliki pemilu yang efisiensi waktu, kecepatan penghitungan suara, dan hemat pembiayaan. Pada pemilu 2004, Belanda menerapkan pemilihan umum berbasis daring sehingga para pemilih dari luar negeri dapat melakukan pemilihan umum. Meskipun demikian, penerapannya justru dihujani kritik, publik belanda mengusung tema kampanye dengan jargon *vertrouwen niet stemcomputers* (kami tidak percaya sistem pemilu berbasis elektronik) yang berhasil membuka kebocoran keamanan dari sistem *e-voting*. Pada Mei 2008, Belanda resmi membatalkan sistem elektronik dan kembali ke sistem manual. Segala upaya untuk mengembangkan sistem *e-voting* baru telah resmi ditutup.

Sementara negara-negara seperti India, Estonia, dan Filipina masih mempertahankan penggunaan *e-voting* dengan kesuksesan khas masing-masing. Pemilu berbasis elektronik

pertama di India ditujukan untuk pelaksanaan dari 20 April sampai 10 Mei 2004. India adalah negara dengan demokrasi terbesar di dunia dengan populasi menyentuh lebih dari 1 miliar. Sebelumnya, aturan di India sempat mengizinkan pemilu elektronik pada 1989 namun baru dilaksanakan terbatas di beberapa negara bagian, pada saat itu belum dilaksanakan untuk pemilu nasional. EVM telah disiapkan oleh industri teknologi informasi dalam negeri, *Electronic Corp of India* dan *Bharat Electronics*. Mesin yang telah diproduksi dalam negeri tersebut dilengkapi dengan kapasitas baterai sehingga dapat dibawa ke daerah terpencil di India.

Sejak 2005, Estonia sukses menjalankan *e-voting* pada 8 pemilihan umum yang terdiri dari pemilihan daerah dan pemilihan uni eropa di negaranya. *E-Voting* di Estonia terdiri dari tiga tahap, pertama para pemilih membuka *website* dengan menggunakan kartu identifikasi dan menggunakan kode PIN untuk mengidentifikasi integrasi identitas untuk masuk ke sistem. Kedua, setelah sistem berhasil memverifikasi identitas pemilih. Sistem memajang daftar kandidat berdasarkan partai yang berada di daerah pemilih, ketiga, dengan mengklik nama kandidat dan memasukkan pin, para pemilih telah berhasil melayangkan pilihannya. Pada aspek teknis, *e-voting* di Estonia membutuhkan kapasitas internet dan literasi digital paling minimal untuk dimiliki setiap warga. Meskipun demikian, pelaksanaan *e-voting* di Estonia relatif mudah dilaksanakan karena total populasi di Estonia sendiri hanya sekitar 1,3 juta penduduk.

Berawal pada 2010, Filipina mulai menerapkan *e voting* dan *e counting* secara berturut-turut pada pemilu 2010, 2013, dan 2016. Dua teknologi yang terdiri dari *e voting* dan *e counting*, masing-masing telah berkontribusi bagi peningkatan partisipasi dan kecepatan penghitungan suara. Tercatat sejak *e-voting*, Filipina meningkatkan partisipasinya dari 74,99% pada 2010 menjadi 77,57% pada 2013 dan 81,62% pada 2016. Kecepatan penghitungan suara juga menjadi luar biasa lebih cepat, pada 2004 penghitungan suara baru rampung 40 hari setelah pemilihan sedangkan pada 2010 penghitungan suara rampung setelah 2 jam dari pelaksanaan pemilihan. Kemudian insiden buruk yang berkaitan dengan pemilu juga dapat dikurangi sekira 50-65% sejak dilaksanakannya *e voting*.

Peluang Penerapan E Voting Pilkada

Pembangunan politik perlu menggunakan teknologi secara

cerdas dengan menimbang pasang surut transformasi metoda pemilihan yang terjadi di beberapa negara. Secara konseptual, *E-Voting* dapat memberikan banyak manfaat bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Kontribusinya terhadap pelaksanaan pemungutan suara pun terbilang masif, sebut saja seperti kecepatan hitung hasil akumulatif suara dan efisiensi tenaga sumberdaya manusia. Tentu saja kelebihan tersebut dibarengi dengan ancaman klasik bagi teknologi berbasis daring seperti Peretasan (*hack*), kesenjangan literasi digital, kesiapan industri dalam negeri, independensi, peran pihak ketiga dan kesiapan masyarakat.

Indonesia baru mengenal penerapan *e voting* yang mapan hanya terbatas pada pilkades yang didukung oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. BPPT mengklaim telah berhasil menerapkan (*e-voting* termasuk *e-counting*) pada 981 gelaran pilkades di 18 kabupaten se-Indonesia. Secara teknis, pilkades berbasis daring tersebut telah memenuhi sebagian besar kaidah pemilihan. Keberhasilan tersebut juga diwarnai kendala seperti yang terjadi di Babakan, Kabupaten Bogor, persoalan teknis seperti hilangnya daya mesin *e-voting* dan tampilan yang tidak memunculkan fitur penting masih terjadi. Tidak hanya itu, pelaksanaan pilkades dengan *e-voting* belum diperkuat sosialisasi yang mumpuni

Meskipun penerapan *e-voting* melalui BPPT telah memenuhi sebagian besar kaidah pemilihan, masih ada tiga kaidah penting yang perlu perhatian dalam teknologi *e-voting*, yakni anonimitas, dapat diverifikasi dan dapat ditelusuri (termasuk dapat diaudit). Untuk itu, sistem *e-voting* yang telah dikembangkan oleh BPPT perlu menyesuaikan sistem kriptografik *end2end* yang terbangun dalam beberapa produk *e-voting* yang telah mapan. Produk-produk tersebut antara lain *Scan-tegrity II, Punchscan*, dan *Pret A Voter*. Kesamaan dari ketiga produk tersebut adalah ketiganya diperkuat sistem *end to end*, kriptografi, masih membutuhkan kertas & alat tulis, membutuhkan Tempat Pemungutan Suara (belum *remote*) serta memiliki *papertrail* yang memuat kode lacak untuk bisa ditelusuri secara jarak jauh.

Selain itu, tahapan sosialisasi dalam penerapan *e-voting* di Pilkada tidak dapat dipandang sebelah mata. Hal ini mengingat dimensi dari kesiapan penerapan *e-voting* di suatu daerah itu berkaitan langsung dengan dimensi sosial. Seluruh elemen masyarakat harus mampu memahami dan menerima penerapan *e-voting* dalam pemilihan kepala daerah.

Skor PISA dan Pentingnya Human Capital di Indonesia

Para ekonom tentu mengenal teori pertumbuhan Neo-Klasik yang mengedepankan peran akumulasi modal sebagai penentu utama laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Bekerjanya teori ini didasarkan keseimbangan jangka panjang dari *capital-labour ratio* yang menghasilkan pertumbuhan mendekati *zero growth* sebagai gambaran level konvergensi ekonomi. Beberapa model pertumbuhan yang menganut Neo-Klasik diantaranya Sollow-Swan dan Harrod Domar. Keduanya secara tidak langsung menegaskan pentingnya peran sumber daya manusia (SDM) sebagai input terpenting di dalam sebuah proses produksi. Terlebih ketika investasi SDM ini bersifat jangka panjang dan terkadang berbenturan dengan kepentingan politik praktis.

Untungnya pemerintah memiliki komitmen terkait investasi SDM ini. Meski belum sempurna, kebijakan yang terkait terus diperbaiki. Satu hal yang perlu disadari, dimensi pembangunan SDM relatif kompleks dan multi sektor. Beberapa sektor pendukung utama seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan infrastruktur harus dapat diidentifikasi karakter dan kebutuhan masing-masing. Karenanya *value for money* dan *activity based costing* (ABC) menjadi terobosan dasar kerja sektoral dalam menciptakan penganggaran berbasis kinerja ke depannya.

Dengan mendasarkan kedua konsep tersebut, penyusunan program dan penganggaran menjadi lebih terukur dan gap yang dijumpai dapat direduksi. Sudah menjadi rahasia umum jika perencanaan program dan penganggaran pemerintah sering terkendala hal ini. Banyak program yang direncanakan tidak mendapatkan anggaran, sementara kegiatan yang tidak direncanakan justru mendapatkan dana yang signifikan. Dengan menjalankan *value for money* dan ABC, maka fenomena tersebut diharapkan tidak lagi



dijumpai karena penyusunan input, program, aktivitas dan kegiatan berada di lintasan yang sama dengan penetapan output serta *outcome*.

Komitmen dan kinerja

Yang terkini, *statement* Presiden pun menyiratkan adanya kemauan ini. Mengutip pernyataan bahwa 'kejayaan minyak dan kayu sudah selesai sama halnya dengan kejayaan komoditas sumber daya alam (SDA) yang hampir mencapai titik optimalnya. Untuk ke depan, Presiden menegaskan kewajiban membangun pondasi SDM yang berkualitas, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IP-TEK). Dan kualitas SDM itu harus dibangun, sejak di dalam kandungan. Oleh sebab itu, tidak boleh ada

lagi yang namanya *stunting* pada anak. Kesehatan ibu dan anak menjadi kunci, terutama pada usia emas tujuh sampai delapan tahun. Presiden juga berpesan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dasar sampai perguruan tinggi demi menghasilkan generasi muda yang pintar dan mampu berkarya di kancah internasional.

Kondisi ini makin diperkuat oleh hasil penilaian *Programme for International Student Assessment* (PISA) OECD 2018, dimana skor pelajar Indonesia dalam membaca, matematika dan sains masih jauh di bawah rata-rata negara anggota OECD lainnya. Sebagai informasi, penilaian PISA setiap tahunnya dilakukan sebagai bahan evaluasi kinerja siswa pendidikan menengah pada tiga bidang utama yaitu literasi, matematika dan sains. Dalam rumpun literasi, siswa di Indonesia masih berada di kategori rendah bersama beberapa negara lainnya seperti Saudi Arabia, Maroko, Kosovo, Republik Dominika dan Phillipina. Nilai rata-rata matematika dan sains untuk seluruh negara anggota OECD adalah 489, sementara nilai rata-rata matematika siswa di Indonesia sekitar 379 dan sains 396. Tak salah jika pembangunan SDM ini menjadi agenda yang sangat mendesak untuk segera diperbaiki.

Realisasi mendorong SDM dinyatakan secara eksplisit di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) secara langsung diarahkan kepada upaya peningkatan SDM melalui investasi pendidikan via penguatan Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), *vocational improvement* serta rehabilitasi sarana prasarana sekolah. Alokasi anggaran Kemenristek Dikti, Kemendikbud, Kemenkes serta Kemensos juga masuk dalam kategori 10 penerima terbesar di tahun 2019. Kemenristek Dikti mendapatkan Rp41,3 triliun, Kemendikbud sebesar Rp36,0 triliun, Kemenkes sekitar Rp58,7 triliun dan Kemensos Rp58,9 triliun.

Belanja pendidikan secara keseluruhan mencapai Rp492,5 triliun di 2019 atau meningkat dibandingkan periode sebelumnya Rp435,0 triliun. Sasaran penerima manfaat meliputi 20,1 juta siswa dalam program PIP kemudian 471,8 ribu mahasiswa dalam skema Bidik Misi dan 57,0 juta siswa melalui BOS serta 56,1 ribu pembangunan/rehabilitasi ruang kelas. Hal yang sama juga menyasar sektor kesehatan yang mendapatkan dana Rp123,1 triliun di 2019 lebih tinggi dibandingkan 2018 sebesar Rp107,4 triliun. Perbaikan program diantaranya perluasan penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 96,8 juta jiwa diikuti perbaikan fasilitas pelayanan kesehatan, intervensi gizi spesifik dan sensitif terkait stunting di 160 kabupaten/kota. Sebagai informasi, angka prevalensi stunting Indonesia masih berkisar 24,8% dengan prevalensi *tuberkulosis* mencapai 245 per 100 ribu penduduk Indonesia.

Penguatan sektor perlindungan sosial ditargetkan untuk mendukung kesejahteraan 40% penduduk berpenghasilan menengah. Cakupannya berupa peningkatan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang mencakup 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Reformasi Bantuan Sosial (Bansos) diubah menjadi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dengan sasaran ketepatan sasaran, waktu dan jumlah, disamping memberikan fleksibilitas kepada masyarakat dalam memilih jenis bahan pokok yang dibutuhkan. Dari jumlah KPM, alokasi BPNT dinaikkan menjadi Rp15,6 juta di tahun 2019 dari awalnya hanya 1,2 juta tahun 2017 dan 10 juta tahun 2018.

Joko Tri Haryanto
Peneliti Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan



Segala kerja yang dijalankan kemudian dievaluasi dalam konsep *Human Capital Index* (HCI) yang dibangun oleh Bank Dunia. Secara formula, HCI dihitung dari 3 unsur komponen yaitu *survival*, sekolah dan kesehatan. *Survival* diturunkan menjadi sub-komponen: probabilitas hidup hingga usia 5 tahun. Sementara komponen sekolah *break-down* menjadi sub-komponen: harapan lama sekolah serta *harmonized test scores*. Terakhir, komponen kesehatan memiliki sub-komponen: survival rate usia 15-60 dan balita yang tidak mengalami stunting.

Skor HCI Indonesia di tahun 2018 sebesar 0,53 dengan mendekati 1 artinya semakin baik. Untuk nilai masing-masing komponen, probabilitas hidup hingga usia 5 tahun (0,974), harapan lama sekolah (12,3), *harmonized test scores* (403), rata-rata hidup usia 15-60 (0,828) serta balita yang tidak mengalami stunting (0,66). HCI ini sendiri didefinisikan sebagai pengukuran produktivitas tenaga kerja di masa depan dari anak yang dilahirkan saat ini, sebagai sebuah nilai relatif *benchmark* jika menamatkan pendidikan dan kesehatan.

Jika dibandingkan negara *lower middle income* lainnya, posisinya masih relatif memuaskan. Namun, jika dibandingkan rata-rata negara kawasan lainnya seperti negara-negara di kawasan *Europe & Central Asia* sebagai perwakilan negara maju, maka skor HCI nya jauh lebih tinggi lagi mencapai 0,71. Bagi pemerintah, meski berat, harapan untuk meningkatkan skor HCI masih sangat terbuka. Terlebih ketika dilihat bahwa empat dari lima komponen HCI Indonesia sudah melampaui HCI yang diperoleh negara-negara *middle income* lainnya. Hanya saja HCI Indonesia relatif jatuh di sub-komponen stunting (0,66) jauh dibawah negara *lower middle income* yang ada di angka 0,73.

Dengan segala daya upaya dan reformasi perbaikan di dunia pendidikan, semoga ke depannya dapat mengejar semua ketertinggalan yang sudah didapatkan hingga saat ini. Satu hal yang perlu diingat bahwa keberhasilan ini membutuhkan koordinasi semua pemangku kepentingan karena bukan pekerjaan sederhana untuk dikerjakan hanya oleh pemerintah semata. Semoga harapan ini betul-betul dapat diwujudkan ke depannya !!!!!

(Ab)normal Baru

Suatu malam di sebuah kafe, saya bertemu dengan teman karib saya. Seingatku waktu itu hari Rabu. Namun kafe ramai sekali dengan pengunjung. *Yah*, mungkin karena memang saat itu adalah pekan pertama restoran dapat melayani pengunjung untuk bisa makan di tempat. Teman saya itu pribadi yang sederhana. Hidupnya *nyantai*, *kalo* anak milenial sekarang bilang dia itu *indie banget*. Bebas, cuek, merdeka, dan pikirannya *plong gak* ada beban. Pas sekali, untuk menjadi lawan bicara saya yang pikirannya sedang kalut.

Gluk gluk, terlebih dahulu saya minum cappuccino pesananku, lantas mengungkapkan segala kedongkolan saya terhadap keadaan saat ini kepada dirinya.

Kedongkolan pertama saya berawal dari datangnya wabah bernama Covid-19. Virus yang menjadi pangkal dari semua masalah saya selanjutnya. Padahal awal tahun ini, ambisi saya sedang ganas-ganasnya untuk membuat program ini itu di kantor. Kebetulan juga saya baru saja dipercaya untuk menjabat dalam satu divisi. Saya ingin jadikan 2020 sebagai awal pembuktian saya. Perencanaan program sudah saya matangkan di tahun sebelumnya. Saya juga tekadkan, berbagai program itu harus jalan dengan baik. Namun Covid-19 mengacaukan segalanya. Program yang sudah saya rencanakan itu terpaksa harus dihentikan semuanya. Alasannya, anggaran habis untuk dialihkan dalam program penanganan Covid-19.



Sialan!

Kedongkolan kedua. Gagalnya saya mudik lebaran akibat larangan dari pemerintah. Lagi-lagi wabah Covid-19 yang jadi penghalangnya. Pemerintah tidak ingin mudik jadi pemicu penyebaran Covid-19 yang lebih luas ke berbagai daerah. Padahal mudik dan menikmati suasana lebaran di rumah adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh seorang perantauan lajang seperti saya ini. Terpaksa saya harus berlebaran mengisolasi diri sendirian di dalam kamar indekos petak 3x2 meter. Tanpa ada ketupat, opor ayam, bahkan tanpa THR dari kantor yang lagi-lagi harus dipotong untuk penanganan Covid-19. Sialan!

Kedongkolan ketiga. Pupusnya harapan saya untuk dapat meminang sang pujaan hati ke pelaminan awal tahun ini.

Karena Covid-19 ini, pemerintah melarang masyarakat untuk mengadakan kegiatan sosial yang menghadirkan kerumunan dalam jumlah besar. *Yaah*, termasuk di dalamnya mengadakan resepsi pernikahan. Terpaksa semua rencana saya dengan berbagai vendor, katering, dan pengelola gedung resepsi harus ditunda, sambil menunggu keadaan yang lebih kondusif. Sialan!

Berturut-turut, berbagai kejadian tadi adalah sebagian dari banyak kejadian yang membuat hati ini kesal. Kondisi hiruk pikuk kafe malam itu malah menambah hati ini ruwet bukan main. *Huuuh*, sedikit saya buang napas untuk melegakan, dan kembali ingin melontarkan berbagai umpatan.

Namun melihat muka saya yang sudah kalut, teman saya langsung menyela. Mulailah mulut dia komat-kamit gantian menanggapi segalanya. "*Uwislah*, hidup itu mengalir saja. Berharap itu memang bikin capek. Mengalir itu meringankan beban hidup. Biasakan tidak berharap dan selalu terima keadaan. Kamu itu coba melawan sesuatu yang sudah jadi bubur. Harus berani *nrimo*," ujar dia dengan logat khas Jawa yang halus.

Mendengar nasihat dia, hati saya *kok* sedikit adem. Padahal kata-katanya terkesan sumir. Namun masih ada sedikit sisa-sisa kejengkelan saya. Apalagi disuruh *nrimo*, yang selama ini susah sekali saya lakukan. Bagi saya, *nrimo* adalah bentuk kekalahan.

Sruppp, *kusruput* lagi cappuccino yang tak terasa sudah setengah gelas itu untuk coba sedikit menenangkan. Mengumpat memang membuat tenggorokan terasa kering. Saya memandang suasana di luar kafe yang rimbun dengan hijaunya taman. Pikiran jadi *agak adem*. Mungkin benar kata teman saya itu. Berani menerima kekalahan juga merupakan bentuk kemenangan. Setidaknya bisa sedikit menenangkan. Kejengkelan yang masih saya rasakan, bersumber dari sisa-sisa ambisi yang masih ingin saya capai di kondisi yang tidak mungkin saat ini. Saya sadar sebuah kesalahan besar untuk mengubah nasi yang sudah jadi bubur.

Yaudahlah, saya belajar untuk *nrimo*. Sebuah jalan sikap baru yang abnormal untuk diri saya saat ini. Sialan pandemi!

■ AJI NUR CAHYO

INFORMASI KELITBANGAN DALAM SATU SENTUHAN



LITBANG.KEMENDAGRI.GO.ID

@badanlitbangkemendagri



Badan Litbang Kemendagri

@LitbangKDN



@badanlitbangkemendagri

@badanlitbangkemendagri





Badan Litbang
KEMENDAGRI

ACCREDITED NUMBER
21/E/KPT/2018 (SINTA 2)



Call for Papers

THEME

“HOME AFFAIRS GOVERNANCE”

SUBTHEME

Regional Autonomy and Bureaucracy
Politics and Public Administration
Territorial Administration
and Rural Governance
Population and Civil Registration
Regional Election and Regional Innovation
Regional Fiscal Policy and Development
Other Issues in Public Administration

INDEXED BY:



RESEARCH AND DEVELOPMENT AGENCY
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

Jl. Kramat Raya 132, Jakarta Pusat
08812-1941-9885 | redaksijbp@gmail.com

TERMS & CONDITIONS

- Open to the public
- Manuscripts may contain the results of empirical or nonempirical research
- Manuscripts should address the theme and subthemes set by the Jurnal Bina Praja Editorial Team
- Submitted manuscripts have not been published in other media
- Manuscripts should have a minimum of 38000-40000 character in Indonesian or English (preferably in English)
- For the writing systematics and format, see <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/index>
- A minimum of 15 references taken from primary sources (scientific journals articles, dissertations, master's theses, undergraduate theses, and/or other research reports)
- Attach biodata along with complete mailing address and contact number.